

Research



IRDH

BUDI PRIHATMININGTYAS

SUATU PENDEKATAN DAN APLIKASINYA TERHADAP STAKEHOLDERS

ETIKA BISNIS

2019

ETIKA BISNIS

SUATU PENDEKATAN DAN APLIKASINYA TERHADAP STAKEHOLDERS

Buku ini bertujuan untuk menambah referensi bacaan terhadap mata kuliah Etika Bisnis, pemanfaatannya adalah untuk memudahkan dan menambah wawasan bagi para akademisi yang sedang mempelajari maupun mendalami matakuliah tersebut. Disamping itu, buku bacaan ini dapat pula dijadikan acuan atau pedoman pokok bagi kalangan para praktisi yang sedang menangani tugas-tugas manajerial dan berhadapan langsung dengan stakeholders.

ETIKA BISNIS

SUATU PENDEKATAN DAN APLIKASINYA TERHADAP STAKEHOLDERS

BUDI PRIHATMININGTYAS

Published by :

Research



IRDH

Office :

Jl. A. Yani, Sokajaya 59 Purwokerto

New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1 Malang

HP. 081 357 217 319 WA. 089 621 424 412

www.irdhcenter.com

email: buku.irdh@gmail.com

ISBN 978-602-0726-17-2



9 786020 726472



Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders

Budi Prihatminingtyas

CV IRDH

Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders

Oleh : Budi Prihatminingtyas

Perancang Sampul : Yorim N. Lasboi

Penata Letak : Agung Wibowo

Penyunting : Cakti I. Gunawan

Pracetak dan Produksi: Yohanes H. Laka

Hak Cipta © 2019, pada penulis

Hak publikasi pada CV IRDH

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENERBIT CV IRDH

Anggota IKAPI No. 159-JTE-2017

Office : Jl. Sokajaya No. 59, Purwokerto

New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1 Malang

HP 081 357 217 319 WA 089 621 424 412

www.irdhcenter.com

Email: buku.irdh@gmail.com

ISBN 976-602-0726-47-2

i-vint + 128 hlm, 25 cm x 17.6

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dan dengan segala keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman, maka dapatlah penulis menyusun buku **Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders** yang kelak dapat dipergunakan oleh kalangan para akademisi. Adapun tujuan utama penyusunan buku bacaan ini adalah untuk menambah referensi bacaan terhadap matakuliah Etika Bisnis, pemanfaatannya adalah untuk memudahkan dan menambah wawasan bagi para akademisi yang sedang mempelajari maupun mendalami matakuliah tersebut. Disamping itu, buku bacaan ini dapat pula dijadikan acuan atau pedoman pokok bagi kalangan para praktisi yang sedang menangani tugas-tugas manajerial dan berhadapan langsung dengan stakehoders. Penulis menyadari bahwa hasil karya yang tertuang di dalam buku bacaan ini masih sangat jauh dari sempurna dan oleh karenanya kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikannya sangat diharapkan. Penulis tetap berusaha terus menyempurnakan buku ini, tentunya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.

Demikian yang dapat penulis sampaikan dan semoga buku bacaan yang telah tersusun dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Malang, 11 januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB 1 ETIKA BISNIS	1
1. ASAL KATA ETIKA	1
2. PENGERTIAN ETIKA	2
3. TUJUAN ETIKA	2
4. KLASIFIKASI ETIKA	2
5. ETIKA BISNIS	4
6. SEJARAH ETIKA BISNIS.....	4
7. KETENTUAN BISNIS DALAM ISLAM.....	5
8. UPAYA PENGEMBANGAN BISNIS	8
9. KLASIFIKASI LEMBAGA BISNIS.....	9
BAB 2 TUJUAN PERUSAHAAN DAN PENERAPAN ETIKA BISNIS.....	12
1. TUJUAN PERUSAHAAN.....	12
2. PENGERTIAN STAKEHOLDER.....	13
3. PENDEKATAN STAKEHOLDER DAN DASAR PEMIKIRAN	14
4. PENGETRAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP OWNERS	15
5. PENGETRAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP SUPPLIER.....	16
6. PENGETRAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP CUSTOMER	16
7. PENGETRAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP KARYAWAN PERUSAHAAN.....	17
8. PENGETRAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP PEMERINTAH	18
9. PENGETRAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP PESAING	19
10. PENGETRAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP MASYARAKAT UMUM	20
BAB 3 BISNIS DAN LINGKUNGAN	21
1. HUBUNGAN BISNIS DAN LINGKUNGAN	21
2. LINGKUNGAN EKSTERNAL.....	21
3. LINGKUNGAN INTERNAL	23
BAB 4 BISNIS MEMERLUKAN ETIKA	27
1. BISNIS TIDAK BEBAS DARI NILAI SOSIAL, NILAI MORAL ATAU NILAI ETIKA ...	27
2. APLIKASI ETIKA BISNIS IDENTIK PENGELOLAAN BISNIS SECARA PROFESSIONAL	28
3. BISNIS MERUPAKAN BAGIAN DARI SISTEM SOSIAL.....	29
BAB 5 SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS	31
1. SISTEM EKONOMI KAPITALIS	31
2. SISTEM EKONOMI SOSIALIS.....	32
BAB 6 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS	34

1.	PRINSIP OTONOMI	34
2.	PRINSIP KEJUJURAN	36
3.	PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT	39
4.	PRINSIP KEADILAN	39
5.	PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI	42
6.	PRINSIP SALING MENGUNTUNGGAN	42
BAB 7 TIPE-TIPE KELOMPOK SOSIAL BUDAYA		44
1.	KONSEP KELOMPOK SOSIAL BUDAYA	44
2.	RAGAM TIPE KELOMPOK SOSIAL BUDAYA	50
3.	KEAHLIAN DAN PROFESIONAL	59
BAB 8 PERUBAHAN SISTEM NILAI BUDAYA		62
1.	PERUBAHAN SISTEM NILAI BUDAYA	62
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	66
3.	KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	68
4.	DAMPAK PERUBAHAN SISTEM NILAI BUDAYA	70
5.	MASALAH KEMANUSIAAN	72
BAB 9 MASYARAKAT DAN PANDANGAN HIDUP		77
1.	KONSEP PANDANGAN HIDUP	77
2.	BERMACAM TIPE PANDANGAN HIDUP	79
BAB 10 KEMISKINAN DAN PERMASALAHANNYA		82
1.	KEMISKINAN	82
2.	MASYARAKAT MISKIN	84
3.	INDIKATOR, PROSES DAN GARIS KEMISKINAN	92
4.	KAUM PEREMPUAN DAN KEMISKINAN	95
BAB 11 BISNIS LINGKUNGAN HIDUP DAN ETIKA INDUSTRI 4.0		100
1.	ETIKA MELAKUKAN PERBUATAN BAIK	101
2.	PRINSIP ETIKA DALAM LINGKUNGAN	103
3.	KRISIS LINGKUNGAN HIDUP	104
4.	HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM	105
5.	MENCARI DASAR ETIKA UNTUK TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN 105	
6.	HAKIKAT KEWAJIBAN	105
7.	PENGERTIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	106
8.	IJIN USAHA	107
BAB 12 RESOLUSI MODEL BISNIS PADA ERA INDUSTRI 4.0		108
1.	FENOMENA ERA INDUSTRI 4.0	108
2.	KOMPETENSI SDM	111
3.	TRANSAKSI ONLINE SHOP	112
4.	PERANAN ETIKA BISNIS DALAM ONLINE SHOP	113
5.	PENGARUH ETIKA BISNIS DALAM ONLINE SHOP	114

BAB 13 ETIKA BISNIS DAN PERMASALAHANNYA.....	116
1. BIDANG EKONOMI DAN BISNIS AMANAH	116
2. BISNIS ONLINE DAN BISNIS KONVENSIONAL	118
3. MASA DEPAN BISNIS OFFLINE	120
DAFTAR PUSTAKA	122
GLOSARIUM.....	124
INDEKS	125
TENTANG PENULIS	127

BAB 1

ETIKA BISNIS

Sebelum membicarakan etika bisnis, perlu terlebih dahulu dipaparkan dasar teori etika sebagai latar belakang pembicaraan mengenai etika bisnis agar dapat dipahami makna etika bisnis. Teori etika ini diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis dalam mengambil keputusan dan tindakan tertentu dalam kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, kita dapat menilai apakah perilaku bisnis tertentu dapat dibenarkan jika dilihat dari sudut pandang teori etika tertentu.

1. Asal Kata Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani dengan nama *ethos*, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Moral atau moralitas dalam pengertian di sini diterapkan untuk menilai baik atau buruk dan benar atau salah terhadap suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan.

Yang dimaksud dengan moral atau moralitas adalah nilai yang dianut atau dipercaya keabsahannya di lingkungan masyarakat. Pemberlakuan moral atau moralitas dalam kehidupan selalu berorientasikan kepada keadilan yang merupakan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Komitmen moral merupakan merupakan perwujudan nilai-nilai moral yang meliputi persaudaraan, kejujuran, kerjasama, kasih-sayang, kemurahan hati, tanggung-jawab, loyalitas, disiplin, integritas pribadi/integritas moral, pemberlakuan yang manusiawi. Dalam integritas pribadi setiap orang dituntut untuk mempunyai rasa malu, rasa bersalah, dan rasa menyesal.

Unsur-unsur dalam moralitas menggunakan unsur kultur, unsur adat istiadat, unsur jiwa dan naluri masyarakat. Ukuran yang dipakai dalam etika terdiri dari : norma, agama, nilai positif dan universalitas. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas.

2. Pengertian Etika

Pengertian etika sering dikonotasikan dengan istilah tatakrama, sopan-santun, pedoman moral dan norma susila. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Sedangkan norma merupakan aturan atau konvensi yang diberlakukan di masyarakat baik secara tersurat atau tersirat (yang bersifat informal dan tradisional).

3. Tujuan Etika

Tujuan mempelajari etika adalah agar dapat tercipta hubungan harmonis, serasi dan saling menguntungkan di antara kelompok manusia sebagai individu atau kelompok dan atau institusi. Karena acuan etika dalam kehidupan sendiri selalu mengacu kepada norma, moralitas sosial, peraturan undang-undang atau hukum yang berlaku.

4. Klasifikasi Etika

Klasifikasi Etika dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok, yang terdiri dari:

- a. Etika Deskriptif, dimana obyek yang dinilai adalah sikap dan perilaku yang sifatnya membudaya.
- b. Etika Normatif, dimana obyek yang dinilai adalah sikap dan perilaku harus sesuai dengan norma dan moralitas berdasarkan acuan umum.
- c. Etika Deontologi, etika yang didorong dengan suatu kewajiban untuk berbuat baik.
- d. Etika Teleologi, etika ini diukur dari tujuan yang dicapai oleh pelaku kegiatan. Aktivitas akan dinilai baik jika bertujuan baik. Artinya sesuatu yang akan dicapai adalah sesuatu yang baik dan mempunyai akibat yang baik. Baik ditinjau dari kepentingan pihak yang terkait, maupun dilihat dari kepentingan semua pihak. Misalnya, tindakan seorang anak yang mencuri demi membayar pengobatan ibunya yang sakit parah akan dinilai secara moral sebagai tindakan baik, terlepas dari kenyataan bahwa secara legal ia bisa dihukum. Sebaliknya, kalau tindakan itu bertujuan jahat, maka tindakan itu pun dinilai jahat.

Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih situasional, karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. Dalam etika muncul dua aliran etika teleologi yang berbeda yaitu:

1. Egoisme yaitu etika yang baik menurut pelaku saja, sedang bagi yang lain mungkin dinilai tidak baik.

2. Utilitarianisme yaitu etika yang baik bagi semua pihak. Artinya semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung akan menerima pengaruh yang baik.

- e. Etika Relatifisme, etika ini tidak berlaku secara global tetapi sesuai dengan adat istiadat lokal, regional, konvensi dan lain-lain. Jelasnya etika ini hanya berlaku bagi kelompok parsial.

5. Etika Bisnis

Etika Bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan antara lain: norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil pelaku bisnis dalam mencapai tujuannya adalah dengan memperhatikan terhadap kepentingan & fenomena sosial dan budaya masyarakat.

6. Sejarah Etika Bisnis

Pada mulanya kegiatan bisnis di negara-negara Eropa merupakan kegiatan yang bernilai moral serta tunduk pada hukum agama seperti tertuang dalam ajaran gereja. Misalnya dalam hal membungakan uang telah ditentang oleh para kapitalis dan merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga kaum moralis atau agamawan meminta kaum kapitalis agar mau menanggung risiko usaha dengan membentuk partnership atau perkongsian. Kronologi membungakan uang ketika itu memang dilarang oleh ajaran agama apabila dipakai untuk tujuan konsumsi atau terhadap peminjam miskin yang dipergunakan untuk tujuan konsumsi. Karena konsumsi tidak ada habisnya.

Pada akhirnya pemberlakuan bunga pinjaman diperbolehkan apabila dapat meningkatkan Return on Investment dan alokasi peminjaman uang dapat dipergunakan untuk mengembangkan atau menumbuhkan sumberdaya ekonomi. Dalam mengelola perusahaan yang harus diperhatikan oleh para manajer, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas perusahaan.
2. Memanfaatkan sumberdaya manusia secara optimal.
3. Bertanggung-jawab terhadap kesejahteraan karyawan.
4. Menciptakan kondisi kerja yang memadai sehingga dengan tenaga kerja sehat dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

7. Ketentuan Bisnis Dalam Islam

Umat Islam sudah sejak awal bersentuhan dengan dunia perniagaan, baik yang dilakukan secara domestik maupun internasional. Termasuk pula Nabi Muhammad SAW pernah terlibat langsung dalam bidang ini sekaligus telah memberikan contoh bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik. Etika dagang yang sesuai dengan ajaran Islam seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW banyak dikaji dan dipelajari, baik oleh kalangan Muslim maupun non-Muslim. Bisnis dalam Agama Islam ditentukan dan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Suci Al Qur'an dan Al Hadist, antara lain:

1. Tidak mengandung unsur riba.
2. Bukan barang najis, haram, dan jelas ketika dalam transaksi.

3. Tidak membawa dampak yang negatif bagi masyarakat umum (misal : penimbunan barang, pornografi, yang berdampak pada kekerasan, kehancuran ekonomi masyarakat)
4. Tidak mengandung unsur perjudian, spekulasi tinggi, penipuan
5. Dilakukan tanpa ada paksaan (sukarela)
6. Tidak melanggar ketentuan hukum dagang misalnya: mengurangi timbangan, menjual barang yang sudah kedaluwarsa, jual beli barang untuk maksiat, membeli barang untuk ditimbun atau spekulasi, menjual barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga umum, menghambat orang dari desa yang akan menjual barangnya di pasar sehingga barangnya dijual terlalu murah karena tidak mengetahui harga pasar yang berlaku, dan membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khir.

Bisnis akan memberikan atau memperoleh suatu keberkahan apabila hasil yang diperoleh dari bisnis tersebut diarahkan untuk tujuan sebagai berikut :

1. Dikeluarkan zakatnya.
2. Dikeluarkan untuk kepentingan sodakoh dalam bentuk sumbangan sosial.
3. Dikeluarkan untuk kepentingan wakaf dalam bentuk amal jariah.

4. Dipakai untuk kegiatan sosial lainnya.

Strategi pengembangan bisnis dalam Agama Islam adalah bagi hasil, di mana dengan pola ini dapat menjamin terhadap :

1. Alokasi sumber pendapatan menjadi lebih baik.
2. Terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai.
3. Menggunakan sistem bagi hasil pendapatan sesuai dengan kesepakatan

Melakukan bisnis untuk mencari keuntungan dengan membeli lebih murah dan menjual dengan harga lebih mahal. Mencari keuntungan perdagangan dalam konsep Islam tidak terbatas pada keuntungan materi saja tetapi juga keuntungan yang bersifat non materi serta keuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pakar ekonomi dan manajemen syariah, Dr. M. Syafii Antonio M.Ec, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berpegang teguh pada empat prinsip dalam bidang perniagaan, antara lain :

1. Siddiq (dapat dipercaya).
2. Amanah (menepati janji).
3. Fathanah (punya wawasan luas).
4. Tabligh (berkomunikasi).

Nabi Muhammad SAW telah membangun sistem perekonomian secara mikro dengan cara sebagai berikut:

1. Menjalin kerjasama bisnis.
2. Membangkitkan semangat wirausaha.
3. Mendirikan pasar.
4. Menetapkan etika bisnis.

Bila dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis, khususnya dalam etika bisnis. Pengusaha besar seperti yang terjadi di negara Amerika dan negara Barat sangat berperan sekali dalam menentukan berbagai macam kebijakan di sektor politik, antara lain:

1. Pemerintah dalam menyusun rancangan undang-undang maupun peraturan pemerintah, norma hukum harus terlebih dahulu mendapatkan restu dari pengusaha besar. Karena peran pengusaha besar dalam kegiatan politik sangat dominan terutama sekali saat kampanye pemilihan Presiden.
2. Kekayaan alam dan seisinya dikuasai sepenuhnya oleh pengusaha besar tentunya dengan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari para pejabat pemerintahan.

Hal ini mengakibatkan dampak kepada pengusaha kecil maupun golongan yang ekonomi lemah, pola kegiatan pengusaha besar tidak sama dengan pengusaha kecil, pengusaha kecil masih membutuhkan bimbingan dari pemerintah dan perguruan tinggi.

8. Upaya Pengembangan Bisnis

Pengembangan bisnis perlu diupayakan dengan mencari informasi sebanyak mungkin mengenai pasar, produksi, konsumen, strategi pesaing. Hasil yang diperoleh dari informasi tersebut di atas dapat dipergunakan oleh CEO (top manajemen) dalam menyusun strategi perusahaan sehingga dapat menembus pasar atau memperkuat posisi perusahaan terhadap pesaing. Dengan demikian pihak perusahaan dapat memperoleh keuntungan bisnis yaitu:

1. Keuntungan Finansial, perusahaan akan memperoleh laba.

2. Keuntungan Non Finansial, tercapainya tingkat kepuasan kerja para karyawan.
3. Keuntungan Sosial, diperolehnya tingkat kepercayaan dari masyarakat khususnya stakeholder.

Sebaliknya jika terjadi kerugian dalam berbisnis merupakan pelajaran dan pengalaman berharga dalam menjalankan bisnis.

9. Klasifikasi Lembaga Bisnis

Robert J. Hughes dan Jack R. Kapoor yang dikutip Buchari Alma, Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan mengetrapkan istilah ini maka kontinuitas usaha dapat terjaga.

Fungsi pokok dari bisnis itu adalah jual-beli barang dan jasa. Sehingga dalam hal ini pengklasifikasian lembaga bisnis terdiri dari:

1. Usaha perseorangan bersifat kecil-kecilan
2. Usaha perusahaan besar, misal: pabrik dan hotel
3. Usaha dalam bidang struktur ekonomi negara, misal: usaha ekspor-impor, valuta asing, perbankan dan sebagainya.

Pengertian bisnis pemasaran yang mencakup, antara lain:

1. Produksi.
2. Promosi.
3. Penjualan.
4. Distribusi.

Prinsip Etika bisnis menurut Sonny Keraf (1998) Ada 5 prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan praktik bisnis, yaitu:

1. Prinsip Otonomi
2. Prinsip Kejujuran
3. Prinsip Keadilan
4. Prinsip Saling Menguntungkan
5. Prinsip Integritas Moral

Bisnis sesungguhnya merupakan suatu profesi di masa depan, untuk ini diperlukan tenaga yang profesional dalam menjalankan kegiatan bisnis. Adapun tenaga profesional yang dimaksud adalah yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Memiliki keahlian, kompetensi, atau kemahiran.
2. Memiliki ketrampilan tingkat tinggi atau khusus dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
3. Mempunyai komitmen moral yang tinggi dan serius antara lain: kejujuran, kerjasama, kasih sayang, kemurahan hati, tanggung-jawab, loyalitas, disiplin, integritas pribadi/integritas moral, pemberlakuan yang manusiawi.

Apabila persyaratan tersebut dapat dipenuhi, selain dapat memberikan tingkat produktivitas yang tinggi terhadap perusahaan, niscaya sifat tamak dan tindakan penipuan yang selama ini sering terjadi dapat dihindari. Sehingga terciptalah suatu hubungan yang harmonis, serasi dan saling menguntungkan dengan stakeholders. Sebaliknya, pihak perusahaan akan mengalami perkembangan yang signifikan.

Yang menjadikan suatu tolok ukur perusahaan dikatakan berkembang secara signifikan apabila :

1. Volume penjualan meningkat yang diiringi dengan meningkatnya keuntungan.
2. Tingkat loyalitas karyawan meningkat dan diiringi dengan menurunnya keluar masuknya karyawan.
3. Produktivitas karyawan meningkat karena didukung dengan meningkatnya tingkat kepuasan kerja karyawan.

Apabila ketiga hal tersebut di atas tercapai, maka dapat dikatakan perusahaan telah mempunyai posisi yang kuat di lingkungan perusahaan pesaing.

BAB 2

TUJUAN PERUSAHAAN DAN PENERAPAN ETIKA BISNIS

Mendirikan suatu perusahaan merupakan tujuan yang sangat mulia karena keberadaannya sangat dibutuhkan baik oleh masyarakat secara khusus maupun pemerintah pada umumnya. Dampak positif dari berdirinya perusahaan adalah dalam memberikan kontribusi yang tidak kecil kepada stakeholders dan dapat dirasakan pada waktu jangka panjang. Tetapi keberadaan perusahaan yang terus berkebang juga tidak bisa terlepas dari peran stakeholder yang sangat menentukan sekali. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tujuan Perusahaan

Pada umumnya tujuan didirikannya bisnis/perusahaan tidak untuk mengejar keuntungan saja, namun secara keseluruhan tujuan didirikannya bisnis/perusahaan meliputi:

1. Mencapai maksimum profit/laba.
2. Meningkatkan harga saham khususnya bila sudah go public.
3. Membuka lapangan pekerjaan
4. Mempertahankan keberlangsungan hidup
5. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pemilik faktor produksi.
6. Meningkatkan volume penjualan.
7. Memproduksi barang/jasa.
8. Mencapai eksistensi perusahaan dalam jangka panjang dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran dan loyalitas terhadap merek produk tertentu.
 - b. Mempertahankan pangsa pasar.
 - c. Menciptakan pasar yang lebih menarik.
 - d. Menghilangkan/mengalahkan pesaing (pesaing dipandang sebagai partner kerja atau mitra perusahaan).
9. Mencapai prestise dan prestasi bagi si pelaku bisnis.
 10. Kemajuan dan perkembangan bisnis/perusahaan

2. Pengertian Stakeholder

Stakeholder adalah para pihak yang berkepentingan dan terlibat langsung dalam menjalin relasi bisnis dengan perusahaan terkait. Stakeholder ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok primer, antara lain: Owner's, pemegang saham, investor, pemodal, pemasok, konsumen, lembaga keuangan, kreditor, seluruh karyawan, relasi bisnis, mitra kerja, pemberi kerja, client, supplier, pelanggan, distributor, pesaing, dewan komisaris, manajer.
2. Kelompok sekunder, antara lain: pemerintah Daerah, pemerintah asing, kelompok Lembaga sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat umum, masyarakat setempat, organisasi lainnya.

Perusahaan harus menjalin relasi bisnis dengan kelompok stakeholder secara baik dan etis apabila ingin berhasil dan bertahan dalam bisnisnya. Dalam kaitannya dengan kelompok sekunder, khususnya terhadap masyarakat setempat agar suasana sosial menjadi

kondusif dan stabil bagi kelangsungan hidup perusahaan, dalam menjalankan operasi bisnisnya perusahaan harus mempedulikan terhadap:

1. Kesejahteraan masyarakat setempat secara mikro dan masyarakat umum secara makro menggunakan dana CSR.
2. Nilai sosial, budaya yang berlaku di masyarakat setempat.
3. Sarana dan prasarana lokal untuk masyarakat setempat.
4. Lapangan Kerja bagi masyarakat setempat.
5. Keamanan bagi masyarakat setempat

Dalam kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, masyarakat setempat bisa sangat mempengaruhi terhadap hidup matinya suatu perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan dengan status BUMN kelangsungan hidupnya sangat dipengaruhi oleh kedua kelompok stakeholders. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus pandai dalam mengadakan pendekatan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai kelompok tersebut. Dengan demikian perusahaan dituntut harus pandai menangani dan memperhatikan kepentingan kelompok stakeholder secara baik.

3. Pendekatan Stakeholder Dan Dasar Pemikiran

Kelancaran dan keberhasilan dalam berbisnis tidak dapat dipisahkan dari peran serta stakeholder. Bagaimanapun juga keberadaan stakeholder, khususnya dalam etika bisnis, perlu dibina terus agar menjadikan partner kerja yang setia dalam jangka panjang. Dalam hal ini, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan

mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini mempunyai tujuan agar hak dan kepentingan pihak stakeholder terkait dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan dan dihargai. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua stakeholder ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Pada akhirnya pendekatan stakeholder menuntut agar bisnis apapun perlu dijalankan secara baik dan etis justru demi menjamin kepentingan semua pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Agar bisnis dari perusahaan dapat berhasil dan bertahan lama, maka perusahaan dituntut untuk memenuhi, menjamin dan menghargai hak serta kepentingan semua stakeholder. Sehingga masyarakat tetap menjalin hubungan berbisnis dengan perusahaan tersebut.

4. Pengetrapan Etika Bisnis Terhadap Owners

Bertanggung jawab terhadap seluruh kepercayaan yang diberikan oleh pemodal meliputi:

1. Menerapkan manajemen yang profesional, misal: tidak melakukan tindakan manipulasi terutama data dan keuangan.
2. Memberikan informasi yang relevan, misal : progres pemasaran.
3. Melindungi, memelihara dan meningkatkan aset milik pemodal.
4. Melaksanakan hasil yang telah dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Pengetrapan Etika Bisnis Terhadap Supplier

Harus didasari hubungan saling menghormati dan menghargai diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Keadilan dan kejujuran, misalnya: dalam hal penentuan harga jual penentuan lisensi, penentuan hak penjualan, penentuan besarnya keuntungan.
- b. Saling memberikan informasi guna integrasi dalam proses perencanaan bersama.
- c. Menjalin kerjasama untuk stabilitas hubungan jangka panjang. Misal: dilegalkan melalui dokumen kontrak.
- d. Hubungan yang bebas dari paksaan, memiliki hak otonomi dalam menentukan partner dagang.
- e. Membuat kesepakatan bersama.

6. Pengetrapan Etika Bisnis Terhadap Customer

Perlunya pengembangan komitmen agar kepuasan pelanggan meningkat sehingga tetap setia bahkan senang terhadap produk perusahaan meliputi:

- a. Memberikan produk/jasa dengan kualitas terbaik yang sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan.
- b. Pelaksanaan periklanan dan promosi harus mencerminkan/menunjukkan sikap hormat pada martabat kemanusiaan.

- c. Menciptakan lingkungan yang sehat terhadap produk/jasa yang dihasilkan, misal : tidak membuang limbah sembarangan.
- d. Memberikan ganti rugi bila pelanggan merasa dirugikan, bisa direalisasikan melalui program pemberian garansi.
- e. Menghormati integritas kultur atau budaya yang berlaku pada perilaku pelanggan perusahaan.

7. Pengetrapan Etika Bisnis Terhadap Karyawan Perusahaan

Karyawan merupakan sumber daya manusia perusahaan karena telah berperan aktif bagi keberhasilan perusahaan, maka perlu mendapat pemberlakuan yang manusiawi dari perusahaan meliputi:

- a. Pemberian lapangan kerja dan imbalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup para karyawan.
- b. Memberikan gaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku sesuai dengan aturan pemerintah.
- c. Komunikasi yang lancar dalam pekerjaan dan transparansi dalam penilaian prestasi kerja.
- d. Respon yang aktif dan saran yang konstruktif dari karyawan agar dijadikan acuan penting dalam pengambilan keputusan.
- e. Perlu adanya negosiasi dengan pihak yang bertikai sehingga pertikaian dapat disalurkan sesuai dengan proporsinya.

- f. Adanya jaminan keselamatan kerja dan kesehatan sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi optimal dalam jangka panjang, misal: karyawan perusahaan diikut sertakan mengikuti Program Jamsostek, BPJS.
- g. Pengembangan sumber daya manusia yang optimal sesuai dengan potensi yang tersedia pada karyawan.
- h. Menekan pengangguran sebagai akibat berakhirnya pekerjaan di lapangan. Misal: karyawan dalam status idle di lingkungan pekerjaan fisik kontraktor/konsultan agar dicarikan proyek sehingga statusnya berubah menjadi “On Project Basis”. Dengan demikian seluruh beban biaya yang terkait menjadi beban biaya proyek bukan biaya overhead.
- i. Kondisi kerja yang diciptakan harus mencerminkan penghargaan perusahaan terhadap kesehatan dan martabat karyawan.

8. Pengetrapan Etika Bisnis Terhadap Pemerintah

Pemerintah yang dimaksud disini adalah sebuah institusi yang dibentuk atas dasar konstitusi negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas. Sebagai institusi membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membiayai operasionalisasi peran dan tugas tersebut, sehingga salah satu bentuk kegiatan atau dana yang diberikan atau disumbangkan oleh masyarakat bisnis kepada negara yang diwakili oleh

pemerintah adalah dalam bentuk ketaatan membayar pajak. Dana pajak yang diterima pemerintah dipergunakan untuk membiayai, antara lain:

1. Pertahanan dan keamanan negara.
2. Pembangunan prasarana dan fasilitas umum.
3. Gaji pegawai negeri dan atau pejabat pemerintah.
4. Pengeluaran lainnya yang terkait dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Masalah pajak, khususnya terhadap pajak penghasilan, bahwa pembebanan pajak memang ditujukan kepada pelaku bisnis yang bersifat umum seperti perusahaan pada umumnya dan pelaku bisnis yang bersifat perseorangan seperti perusahaan perseorangan.

Bagi perusahaan dengan kategori umum pajak penghasilannya diperhitungkan dari laba kotor untuk mendapatkan laba bersih. Tetapi bagi perusahaan dengan kategori perseorangan (khususnya terhadap pelaku bisnis pemeluk agama islam) bahwa pembebanan pajak diperhitungkan dari laba bersih setelah dikurangkan dengan zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini oleh Kantor Pelayanan Pajak telah diakui sebagai biaya.

9. Pengetrapan Etika Bisnis Terhadap Pesaing

Adalah suatu pandangan yang keliru bilamana perusahaan pesaing dianggap sebagai musuh utama dalam berbisnis dan harus dibunuh atau dimatikan. Pesaing agar dipandang sebagai mitra kerja sehingga dapat memberikan manfaat bagi si pelaku bisnis, antara lain:

1. Mengetahui keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh pesaing, sehingga dapat dijadikan sebagai tantangan untuk memacu peningkatan keunggulan perusahaan.
2. Memacu pada rangsangan untuk mengembangkan daya kreativitas perusahaan yang berkompetisi sehingga dapat meningkatkan inovasi dalam menembus pangsa pasar.
3. Perusahaan dapat melakukan mitra kerja dalam bentuk sinergy, akuisisi dan atau merger. Dengan bentuk mitra kerja semacam ini gabungan perusahaan menjadi kian kuat dan memiliki daya yang berlipat ganda dalam posisi persaingan.

10. Pengetrapan Etika Bisnis Terhadap Masyarakat Umum

Perusahaan dan masyarakat bersifat saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan masyarakat karena dari masyarakat perusahaan dapat tumbuh dan berkembang maupun menggantungkan kelangsungan hidupnya. Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai: Pasar potensial, sumber tenaga kerja. Supplier atau pemasok merupakan sumberdaya yang diperlukan perusahaan, antara lain: Bahan baku, tenaga kerja, alat produksi, sarana dan prasarana, modal, teknologi rekayasa, manajemen dan lainnya. Demikian pula masyarakat membutuhkan perusahaan karena dari perusahaan dapat diperoleh: Barang atau jasa, lapangan pekerjaan, mitra kerja.

BAB 3

BISNIS DAN LINGKUNGAN

1. Hubungan Bisnis Dan Lingkungan

Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Sehingga bisnis tidak terlepas dengan faktor lingkungan yang mendukung maupun yang menghambat atas tujuan yang ingin dicapai bisnis. Secara umum lingkungan bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Menurut Prihatminingtyas dan Susanto (2015) ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: (1) Kelemahan dalam memperoleh peluang (akses) pasar dan memperbesar pangsa pasar; (2) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur (akses) terhadap sumber permodalan; (3) Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen; (4) Keterbatasan dalam pemanfaatan (akses) dan penguasaan teknologi; (5) Keterbatasan jaringan usaha dan kerjasama usaha. Faktor eksternal meliputi: (1) Iklim berusaha yang kurang mendukung (kondusif); karena masih ada persaingan yang tidak sehat; (2) Sarana dan prasarana perekonomian yang kurang memadai; (3) Pembinaan yang masih kurang terpadu; (4) Masih kurang pemahaman, kepercayaan dan kepedulian dari sebagian masyarakat terhadap usaha kecil.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu yang bersifat umum dan bersifat khusus.

2.1. Lingkungan Eksternal Yang Bersifat Umum

Lingkungan eksternal ini merupakan variabel strategis dan mempunyai dimensi/ukuran jangka panjang. Secara strategis sering menentukan peluang atau tantangan yang dihadapi bisnis. Adapun unsur lingkungan eksternal yang bersifat umum terdiri dari:

- a. Unsur hukum.
- b. Unsur budaya.
- c. Unsur agama.
- d. Unsur politik.
- e. Unsur ekonomi.
- f. Unsur sosial / masyarakat.
- g. Unsur geografi.
- h. Unsur pendidikan.

2.2. Lingkungan eksternal yang bersifat khusus

Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal yang bersifat khusus adalah secara langsung mempengaruhi kegiatan bisnis. Unsur lingkungan eksternal yang bersifat khusus terdiri dari:

- a. Unsur teknologi.
- b. Unsur competitor.
- c. Unsur customer.
- d. Unsur serikat pekerja.

- e. Unsur supplier.
- f. Unsur bursa tenaga kerja dan lain-lain.

Adapun ciri-ciri dari unsur lingkungan eksternal yang bersifat khusus adalah sebagai berikut :

- a. Relatif sulit dapat dikendalikan oleh bisnis.
- b. Mengikuti dan menyesuaikan terhadap perubahan atau dinamika dari unsur eksternal lebih sering untuk kegiatan bisnis.

3. Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan unsur yang secara langsung akan mempengaruhi bisnis. Yang termasuk unsur dalam lingkungan internal disini adalah:

- a. Unsur tenaga kerja.
- a. Unsur alat-alat.
- b. Unsur modal.
- c. Unsur sarana dan prasarana yang tersedia di dalam perusahaan.
- d. Unsur sistim manajemen, antara lain:
 - Manajemen pemasaran.
 - Manajemen keuangan.
 - Manajemen operasi.
 - Manajemen sumber daya manusia.
 - Sistim informasi manajemen.

- Penelitian dan pengembangan.
- f. Unsur budaya perusahaan, antara lain:
 - Perencanaan.
 - Komunikasi.
 - Kemantapan
 - Ketegasan.
 - Dinamis
 - Pelatihan dan pengembangan.
 - Pengambilan keputusan.
 - Pengambilan risiko.
 - Perhatian pada imbalan.
 - Perhatian yang detail.
 - Praktek manajemen.
 - Orientasi pada orang.
 - Orientasi pelanggan.
 - Orientasi tim / teamwork.
 - Inovasi.

Adapun ciri unsur lingkungan internal adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan, dimana tingkat pengendaliannya relatif mudah.

- b. Dapat dipengaruhi secara langsung oleh manajemen perusahaan, karena perusahaan mempunyai bargaining power yang cukup kuat.

Sumber dari ekonomi antara lain: sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan rekayasa/engineering yang berada di bawah kendali manajemen perusahaan relatif lebih cepat disesuaikan dengan perubahan yang diinginkan. Baik oleh perubahan karena eksternal perindustrian ataupun karena perubahan strategi yang diharapkan manajer perusahaan. Adapun perubahan terhadap eksternal perindustrian memiliki sifat tidak dapat dikendalikan karena di luar jangkauan kemampuan manusia (beyond the control).

Dalam rangka mengantisipasi bisnis berkait dengan pengaruh lingkungan eksternal di atas, maka pelaku bisnis perlu mengambil langkah sebagai berikut :

- a. Menggali secara detail sumber informasi diluar yang formal dan resmi.
- b. Membangun jaringan informasi secara formal dan informal
- c. Harus memiliki sumber informasi dari pusat pengambilan keputusan kebijaksanaan lingkungan makro (insider sources).

Sebaliknya unsur internal yang berada di dalam perusahaan lebih cepat diadaptasikan dengan perubahan lingkungan yang lainnya.

Untuk mencapai keunggulan kompetitif perlu diperhatikan enam faktor antara lain (Prihatminingtyas, 2010):

1. Kejujuran artinya perilaku pengusaha harus jujur pada produk yang dijual, keaslian barang yang dijual.
2. Menghargai waktu. Ada pepatah waktu adalah uang sehingga pengusaha dalam menjalankan bisnis harus memperhatikan bagaimana mendistribusikan waktu dengan baik.
3. Penentuan harga produk berdasarkan pengeluaran biaya tetap dan biaya tidak tetap, ditambah dengan keuntungan. Harga jual yang rendah dapat meningkatkan permintaan terhadap produk, tetapi juga mengurangi keuntungan.
4. Kualitas produk adalah dimensi dari suatu produk yang ditetapkan oleh konsumen. Produk yang di pasarkan merupakan produk yang dipesan konsumen harus sesuai dengan perjanjian.
5. Fleksibilitas dalam menangkap selera konsumen, yaitu operasi perusahaan yang memungkinkan dapat merespon kebutuhan pelanggan secara tepat dan efisien. Pengusaha dituntut mampu untuk mencapai daya saing.
6. Norma agama, merupakan hal yang tidak boleh dilupakan dalam membentuk daya saing usaha kec

BAB 4

BISNIS MEMERLUKAN ETIKA

Dalam pengembangan bisnis yang tidak terlepas dengan eksistensi masyarakat secara luas dimana bisnis membutuhkan masyarakat dan masyarakat membutuhkan bisnis, maka harus menggunakan etika dalam kegiatan operasional. Hal ini dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Bisnis tidak bebas dari nilai sosial, nilai moral atau nilai etika

Kita mengetahui bahwa bisnis membutuhkan masyarakat dan masyarakat membutuhkan bisnis. Atas dasar itulah kebutuhan bisnis dalam aspek kehidupannya tidak terlepas dengan eksistensi masyarakat dengan segala atribut dan simbol yang melekat pada masyarakat. Tetapi jika kita lihat lebih jauh, terutama jika kita tinjau dari teori dan perkembangan ilmu bisnis, ternyata bisnis tidak bebas dari nilai moral maupun nilai etika.

Tujuan bisnis secara umum adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan stakeholders. Jika pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnisnya senantiasa berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan stakeholders, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan akan hidup atau eksis dalam jangka panjang.

Dalam ilmu pemasaran disebutkan bahwa keberhasilan untuk memperoleh keuntungan komersial atau penerimaan dengan cara memberikan kepuasan terhadap pelanggan lama dan pelanggan baru. Demikian juga di dalam ilmu pengelolaan sumberdaya manusia atau

personalia, mengantarkan pemahaman bahwa reward yang layak dan adil sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh manajer atau pemilik akan menjamin usaha peningkatan produktivitas perusahaan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis tidak dapat lepas sama sekali dari nilai sosial (memberikan bantuan tanpa pamrih), nilai moral dan nilai etika yang dibutuhkan untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan supaya tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungan. Ditinjau dari sistem masyarakat, di mana bisnis merupakan sub sistem atau substansi, mekanisme interaksi antara bisnis dan lingkungan bisnis ada hubungan timbal balik yang mengharuskan penertiban dan pengaturan yang didukung dengan etika atau norma kehidupan untuk mendukung terciptanya hubungan harmonis antara sub sistem dan sistem sosialnya.

2. Aplikasi etika bisnis identik pengelolaan bisnis secara profesional

Ruang lingkup etika bisnis meliputi keterkaitan yang harmonis, saling menguntungkan antar pihak stakeholders dan pihak eksternal lainnya. Hal ini merupakan tuntutan yang harus dipenuhi bilamana perusahaan mau tumbuh dan berkembang dan maju secara kontinyu dalam jangka panjang. Adapun prinsip dalam pengelolaan bisnis secara profesional dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Merasa ikut memiliki.
- b. Tekun, tabah dan ulet.
- c. Memegang teguh komitmen moral khususnya faktor kejujuran, dalam pengertian tidak ada unsur manipulasi dan KKN.

- d. Efektif dalam memanfaatkan sumberdaya secara optimal.
- e. Didukung oleh tenaga ahli dan teknologi canggih.
- f. Efisien dalam pengelolaan biaya.
- g. Adanya transparansi dalam setiap penentuan kebijakan perusahaan. Misal: kebijakan dalam hal pemberian apresiasi terhadap hak dan kewajiban karyawan yang berprestasi.

3. Bisnis merupakan bagian dari sistem sosial

Dalam kenyataan memang tidak dapat disangkal bahwa sebuah lembaga bisnis membutuhkan masyarakat dan dibutuhkan masyarakat. Kegiatan bisnis pertama-tama harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat, kalau masyarakat dijadikan sebagai sumber dan sasaran yang ingin dituju oleh bisnis. Sehingga dapatlah terjalin keharmonisan hubungan dengan pihak-pihak terkait di dalam masyarakat.

Perusahaan melihat masyarakat sebagai sumber potensi yang dapat menghidupi perusahaan. Sebaliknya perusahaan harus juga menempatkan diri sebagai lembaga yang eksistensinya memang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu pelaku bisnis harus menyadari bahwa keberadaannya di masyarakat merupakan bagian dari masyarakat. Pelaku bisnis yang baik harus dan tetap berusaha terus dalam membangkitkan sense of belonging (rasa ikut memiliki) dari masyarakat terhadap perusahaan yang di bawah kewenangan. Adapun cara yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain:

1. Memberikan hak atas kesempatan untuk berkarya kepada masyarakat.

2. Memberikan hak atas pengembangan kegiatan sosial, budaya dan religius.

3. Memberikan hak atas pelestarian alam dan lingkungan hidup kepada masyarakat tidak mencemari lingkungan.

Ternyata bisnis dan sosial saling terikat, hidup berdampingan saling tergantung dan saling menentukan eksistensi masing-masing.

BAB 5

SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS

Sistem Ekonomi

Di dunia ini pada dasarnya terdapat dua sistem perekonomian yang berlaku, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang dapat dijelaskan pada berikut ini.

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Negara tidak berhak ikut campur terhadap kebebasan perilaku pengusaha secara individu.
- b. Setiap individu mempunyai hak mutlak dalam mengambil manfaat atas harta ataupun kekayaan.
- c. Setiap individu bebas berusaha sesuai keinginannya.
- d. Nilai moral sangat minim bahkan cenderung tidak ada atau hilang.
- e. Manusia secara individu bebas berkreasi secara optimal dalam memproduksi dan distribusi untuk mencapai keuntungan maksimum.
- f. Setiap diterbitkannya undang-undang dan atau peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pengusaha besar.

- g. Sumber kekayaan negara dikuasai, dimiliki dan dikelola secara leluasa oleh pengusaha besar. Dengan cara seperti ini, hasilnya lebih banyak dinikmati oleh segelintir pengusaha ketimbang dirasakan oleh rakyat banyak.

Dalam sistem ekonomi kapitalis hak individu sangat dominan sehingga pencapaian tujuan individu sering kontradiktif dengan tujuan sosial, yakni menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata di masyarakat berikut ketenangan lingkungan hidup.

Nilai moral yang terdiri dari (persaudaraan, kejujuran, kerjasama, kasih-sayang, kemurahan hati, tanggung-jawab, loyalitas, disiplin, integritas pribadi/integritas moral, pemberlakuan yang manusiawi) menjadi tidak harmonis di dalam sistem kapitalis. Setiap individu lebih mementingkan diri sendiri daripada kepada masyarakat. Pada hal prinsip pengelolaan bisnis yang lebih profesional justru harus memperhatikan kepentingan pihak terkait dan saling mendukung untuk bermitra kerja dengan lingkungannya.

2. Sistem Ekonomi Sosialis

Ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kebersamaan sosial dan ekonomi masyarakat sepenuhnya diatur secara penuh oleh Negara.
- b. Segala aktivitas produksi dan distribusi ditentukan oleh Negara.

- c. Individu tidak berhak dalam kepemilikan atas harta benda atau kekayaan, serta penggunaan, yang sepenuhnya ditentukan oleh Negara.
- d. Hak-hak individu dibatasi dan tidak terdapat kesempatan yang maksimal untuk berkreasi dan mengadakan kegiatan yang produktif.
- e. Segala kebutuhan dan keinginan masyarakat atas suatu barang atau jasa dikontrol dan di atur serta dikendalikan oleh Negara.

Dalam aplikasinya sistem ekonomi sosialis justru menimbulkan keejangan dalam alokasi sumberdaya ekonomi secara maksimal bagi masyarakat luas. Hal ini terjadi karena para individu kehilangan semangat dan gairah untuk meningkatkan produktivitasnya (terjadi penurunan produktivitas), yang berdampak pada menurunnya semangat profesionalisme.

Sistem ekonomi sosialis terkesan membelenggu produktivitas sumberdaya ekonomi. Justru etika bisnis menekankan produktivitas yang tinggi dengan pemberian alokasi sumberdaya ekonomi secara adil dan layak bagi yang pantas menerima sesuai dengan prestasi dan peran yang dilakukan oleh pemilik sumberdaya ekonomi.

BAB 6

PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS

Secara umum etika bisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Oleh karena itu etika bisnis memiliki prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bisnis yang dimaksud. Adapun prinsip etika bisnis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi adalah perusahaan secara bebas memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan dan pelaksanaan sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki.

bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Sedangkan cirinya, antara lain :

- a. Mengetahui bidang kegiatan yang ditekuninya.
- b. Mengetahui situasi yang dihadapinya.
- c. Mengetahui apa yang diharapkan dari bidang usaha yang ditekuni.
- d. Mengetahui tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya.
- e. Sadar dan mengetahui akan keputusan dan tindakan yang akan diambil.

- f. Sadar dan mengetahui akan terjadi risiko yang timbul bagi: Dirinya sendiri, Perusahaan, dan pihak lain.
- g. Sadar dan mengetahui bahwa keputusan dan tindakan yang akan diambilnya akan sesuai atau, sebaliknya, bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu.

Syarat Yang Harus Dimiliki Orang Bisnis Yang Otonomi

Persyaratan bagi orang bisnis yang otonom adalah memiliki kebebasan karena merupakan unsur hakiki dari prinsip otonomi. Adapun kebebasan yang dimaksud disini antara lain:

- a. Kebebasan dalam mengambil keputusan.
- b. Kebebasan bertindak berdasarkan keputusan yang terbaik dalam waktu yang tepat.
- c. Dilandasi tanggung jawab.

Dalam etika, kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis, karena tindakan etis itu sendiri, dalam bahasa indonesia, bersumber dari kemauan baik dan kesadaran pribadi untuk berbuat baik. Kebebasan berbuat baik kepada pelaku bisnis pada skala besar maupun skala kecil untuk tidak hanya melakukan:

- a. Menuntut hak.
- b. Perintah bekerja.
- c. Melakukan pengendali dari luar.
- d. Perlakuan tidak etis

Secara khusus dalam dunia bisnis, tanggung jawab moral yang diharapkan dari setiap pelaku bisnis yang otonom mempunyai dua arah.

Pertama, yang paling pokok adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kedua, tanggung jawab moral juga tertuju kepada semua pihak terkait yang berkepentingan stakeholders. Hal ini memperlihatkan bahwa bisnis bukan sekadar asal melakukan bisnis, melainkan melakukan bisnis dengan pertimbangan yang sangat matang. Etika bisnis adalah aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, aturan-aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis (Fahmi, 2013:3). Jadi etika bisnis menyangkut baik atau buruknya perilaku manusia dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis yang beretika harus dilihat dari tiga sudut pandang yaitu ekonomi, hukum, dan moral (Bertens, 2013: 25). Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. b) Dari sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan hukum c) Dari sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan moralitas.

2. Prinsip Kejujuran

Kegiatan bisnis secara umum terdiri dari kegiatan berproduksi dan penjualan, baik dilakukan sekaligus atau terpisah. Dilakukan sekaligus bila perusahaan disamping melakukan kegiatan berproduksi atas suatu barang atau jasa, juga melakukan kegiatan pemasaran atas barang atau jasa tersebut. Disamping itu perusahaan ada yang hanya melaksanakan kegiatan berproduksi saja atau pemasaran saja.

Berkait dengan kegiatan bisnis tersebut, prinsip kejujuran merupakan merupakan nilai yang paling mendasar (modal dasar atau aset yang paling dan sangat berharga) dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Karena kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang, dalam suasana bisnis yang penuh persaingan ketat. Dalam lingkup kegiatan

bisnis prinsip kejujuran menumbuhkan kepercayaan, sekaligus merupakan syarat, untuk dapat menjalankan bisnis secara profesional bersama-sama dengan:

- a. Karyawan Perusahaan.
- b. Pelanggan dan Konsumen.
- c. Pemasok atau Rekanan.
- d. Pihak lain yang terkait dalam menjalin relasi bisnis.

Aplikasi prinsip kejujuran dalam kegiatan bisnis ditujukan terhadap bidang-bidang berikut:

a. Perjanjian Kontrak Kerja

Ini merupakan momentum terbinanya suatu kerjasama lanjutan di bidang-bidang bisnis lain terhadap: Perusahaan lain, Tenaga Ahli, Peneliti dan lain lain. Distributor, pemasok dan lain lain. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak harus dipenuhi secara konsekuen. Bila tidak berarti pelaku bisnis telah menggali kubur bagi bisnisnya sendiri.

b. Penawaran Barang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepercayaan konsumen adalah hal yang paling pokok. Perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan konsumen dimana produk yang dibuat dan dipasarkan harus benar-benar mencerminkan kualitas produk yang sesuai dengan fakta, tidak terdapat unsur manipulasi. Jika konsumen merasa tertipu, dalam waktu singkat akan mempunyai efek multiplier-expansive yang luar biasa.

c. Hubungan Kerja Dengan Perusahaan Lain

Yang dimaksud dengan perusahaan lain disini dapat berupa para pesaing dari perusahaan yang sejenis atau mitra usaha antara lain: perusahaan agen, distributor, pemasok. Khusus dalam hubungan dengan pesaing perusahaan agar secara jujur dianggap sebagai teman atau kolega. Karena perusahaan pesaing ini dapat diikut sertakan sebagai mitra usaha sesuai dengan prinsip win-win solution (suatu hubungan yang bertujuan saling membutuhkan, saling menutupi, saling menghidupi dan saling menguntungkan). Tidak diperkenankan saling membunuh atau saling mematikan bidang usaha dengan perusahaan pesaing. Terhadap perusahaan milik pesaing agar diterapkan bentuk lomba dalam memberikan pelayanan terbaik, mutu terbaik dan harga terjangkau.

d. Hubungan Dengan Tenaga Kerja

Perusahaan harus berprinsip bahwa tenaga kerja harus dipandang sebagai mitra usaha. Sedangkan kejujuran dalam perusahaan hanya mungkin terjaga kalau ada etos bisnis yang baik, dimana karyawan diperlakukan secara baik dan manusiawi, diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak tertentu pemberian upah yang adil, pemberian kompensasi lembur yang wajar dan terbinanya sikap saling menghargai sebagai manusia antara satu dan yang lainnya. Hal ini akan mendorong kreativitas dan meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan sehingga meningkatkan produktivitas karyawan.

3. Prinsip Tidak Berniat Jahat

Bisnis didirikan dengan suatu komitmen untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan karyawan, masyarakat konsumen atau stakeholders pada umumnya. Komitmen ini adalah untuk mencapai tujuan yang baik dan positif. Sehingga tidak terlintas niatan untuk berbuat jahat terhadap masyarakat. Prinsip ini justru akan dapat menyelamatkan perusahaan.

4. Prinsip Keadilan

Yang dimaksud dengan keadilan adalah tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis internal perusahaan maupun relasi eksternal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Keadilan ditujukan kepada stakeholders terkait dengan penetapan yang sudah disepakati bersama, antara lain:

1. Penetapan harga jual yang layak terhadap konsumen.
2. Penetapan harga beli yang layak terhadap pemasok.
3. Penetapan keuntungan yang wajar terhadap pemilik perusahaan.
4. Penetapan upah yang layak terhadap karyawan.

Sudut pandang ekonomis yang perlu diperhatikan antara lain:

Sudut pandang moral dan etika. Dalam sudut pandang ini mengejar keuntungan merupakan hal yang wajar, asalkan tidak tercapai dengan merugikan pihak lain. Maka menghormati kepentingan dan hak

orang lain merupakan hal yang penting. Jadi, ada batasnya juga dalam mewujudkan tujuan perusahaan namun hal itu juga harus demi kepentingan bisnis itu sehingga bisnis yang etis tidak membawa kerugian bagi bisnis itu, terutama dilihat dari jangka panjang. Aspek etis dalam sudut pandang moral dan etika bisa dilihat dari janji yang harus ditepati, kepercayaan, dan menjaga nama baik. Dengan demikian perilaku baik dalam konteks bisnis dalam sudut pandang moral adalah perilaku yang sesuai dengan norma moral dan agama karena suatu perbuatan dinilai baik menurut arti terdalam justru kalau memenuhi standar etika. Disamping dari sudut pandang hukum membutuhkan sudut pandang moral antara lain:

1. Hukum dirumuskan dengan baik, tetapi karena salah satu alasan sulit untuk dilaksanakan, misalnya karena sulit dijalankan evaluasi yang efektif. peraturan hukum yang tidak ditegakkan akan ditaati juga.
2. Banyak hal bersifat tidak etis, sedangkan menurut hukum tidak dilarang. tidak semuanya yang bersifat tidak memiliki moral dianggap ilegal.
3. Hukum sering kali bisa disalah gunakan. Perumusan hukum tidak pernah sempurna, sehingga orang yang beritikad buruk bisa memanfaatkan celah dalam hukum yang berlaku.
4. Proses terbentuknya undang-undang atau peraturan hukum lainnya memakan waktu lama, sehingga masalah-masalah baru tidak segera bisa diatur secara hukum.
5. Sudut pandang moral hukum kerap kali mempergunakan pengertian yang dalam kontek hukum tetapi tidak didenifisikan dengan jelas dan sebenarnya diambil dari konteks moral.

Sudut pandang hukum bisnis adalah kegiatan ekonomis dengan maksud memperoleh untung. Dalam bisnis modern keuntungan diekspresikan dalam bentuk uang. Prinsip kegiatan antar manusia bertujuan untuk mencari keuntungan, karena itu menjadi kegiatan ekonomis. Jadi bisnis selalu bertujuan mendapat keuntungan dan perusahaan dapat disebut organisasi yang didirikan dengan tujuan mencari keuntungan. Teori ekonomi menjelaskan bagaimanapun dalam sistem ekonomi pasar bebas para pengusaha dengan memanfaatkan sumber daya yang langka antara lain: tenaga kerja, bahan mentah, menghasilkan barang dan jasa yang berguna untuk masyarakat. Jika kompetisi pada pasar bebas berfungsi dengan semestinya, selanjutnya akan terjadi efisiensi di bidang ekonomis, artinya menggunakan prinsip ekonomi untuk mencapai hasil maksimal akan dicapai dengan pengeluaran minimal dalam harga produk atau jasa yang paling menarik untuk publik. Oleh karena efisiensi merupakan kata kunci dalam ekonomi modern, para ekonom telah mengembangkan berbagai kegiatan. Dengan demikian dari sudut ekonomis, good business adalah bisnis yang membawa banyak keuntungan.

Hukum dan etika memiliki kaitan yang erat karena etika harus menjwai hukum. berarti peraturan hukum harus ditentukan supaya keadaan tidak menjadi kacau, tetapi cara diaturnya tidak berkaitan dengan etika sehingga peraturan hukum merupakan keyakinan moral. Cabang penting dalam ilmu hukum modern adalah hukum dagang atau hukum bisnis sebab hukum merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dari

segi norma, hukum lebih jelas dan pasti karena peraturan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan ada sanksi tertentu.

5. Prinsip Hormat Pada Diri Sendiri

Prinsip ini merupakan prinsip tindakan bisnis yang dampaknya berpulang kembali kepada bisnis itu sendiri. Pelaku bisnis dituntut menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Sebagai contoh, seandainya manajemen perusahaan dengan team worknya memiliki falsafah kerja dan berorientasikan memberikan kepuasan kepada pelanggan, maka dapat dipastikan para pelanggan akan makin percaya terhadap perusahaan. Demikian juga jika para manajemen berorientasikan pada pemberian kepuasan kepada karyawan yang berprestasi, maka dapat dipastikan karyawan akan makin loyal terhadap perusahaan. Oleh karena itu prinsip hormat pada diri sendiri mesti diberlakukan pada estika bisnis.

6. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Karena sebagai produsen ingin mendapatkan keuntungan dan sebagai konsumen ingin mendapatkan barang dan jasa yang memuaskan (dalam bentuk harga wajar, kualitas baik dan pelayanan baik), maka bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan produsen dan konsumen. Dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu win-win solution. Etika diharapkan mampu

memberikan manfaat yang berarti bagi pelaku usaha, sehingga diharapkan etika dapat mendorong dan mengajak untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan serta dapat dipertanggung jawabkan. Etika di harapkan mampu mengarahkan pelaku usaha untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai dan sejahtera dengan mentaati norma yang berlaku demi ketertiban dan kesejahteraan sosial. Setiap pelanggaran yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja harus diselesaikan menurut kode etik yang berlaku.

BAB 7

TIPE-TIPE KELOMPOK SOSIAL BUDAYA

1. Konsep Kelompok Sosial Budaya

Kelompok sosial budaya adalah lingkungan hidup sosial budaya yang memiliki bentuk, cara hidup, dan tujuan tertentu. Dalam definisi tersebut, dapat dirinci 4 (empat) unsur utama konsep kelompok sosial budaya, atas dasar mana muncul bermacam ragam tipe kelompok sosial budaya.

Unsur utama kelompok sosial budaya antara lain:

1. Lingkungan sosial budaya,
2. Bentuk sosial budaya,
3. Cara hidup sosial budaya, dan
4. Tujuan sosial budaya

A. Lingkungan Sosial Budaya

Lingkungan sosial budaya adalah sejumlah manusia yang hidup berkelompok dan saling berinteraksi secara teratur guna memenuhi kepentingan bersama. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dibekali oleh penciptanya dengan budaya. Agar manusia dan budayanya itu dapat berkembang dengan sempurna, dia harus hidup bersama dengan manusia lain, yang disebut hidup bermasyarakat (mahluk sosial). Hidup bermasyarakat merupakan cara memfungsikan budaya dengan berinteraksi secara teratur antara sesamanya, sehingga kepentingan bersama dapat terpenuhi secara wajar dan sempurna. Keteraturan itu tercipta karena masing-masing

mempunyai persepsi penilaian yang sama terhadap diri dan kebutuhan yang mereka kehendaki. Dengan demikian, mereka mempunyai nilai kemanusiaan yang sama dan saling menghargai.

B. Bentuk Sosial Budaya

Bentuk sosial budaya, artinya setiap kelompok sosial budaya mempunyai batas-batas yang jelas dan telah ditentukan berdasarkan tipe kelompok, yang membedakannya dengan kelompok yang lain. Tipe kelompok dibedakan lagi antara yang tradisional alamiah dan yang modern. Tipe kelompok tradisional alamiah didasarkan pada kesatuan geografis, ikatan perkawinan dan hubungan darah, sedangkan tipe kelompok modern didasarkan pada kepentingan yang sama dan keahlian profesional.

Dengan demikian, ada 4 (empat) macam tipe kelompok sosial budaya yaitu:

1. Kelompok sosial budaya berdasarkan kesatuan geografis, seperti desa, kota, daerah aliran sungai, daerah pantai, dan daerah pegunungan.
2. Kelompok sosial budaya berdasarkan ikatan perkawinan dan hubungan daerah, seperti keluarga dan keluarga besar.
3. Kelompok sosial budaya berdasarkan kepentingan yang sama seperti Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan.
4. Kelompok sosial budaya berdasarkan keahlian profesional seperti kelompok profesi dan kelompok pengusaha.

Tipe kelompok sosial budaya modern yang berdasarkan kepentingan yang sama dan berdasarkan keahlian profesional berhimpun dalam

organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan Anggaran Dasar, diketahui dan/atau diakui oleh masyarakat luas atau oleh pemerintah. Dalam Anggaran Dasar ditetapkan asas, tujuan, fungsi, dan jenis kegiatan organisasi mereka. Akan tetapi, tipe kelompok sosial budaya tradisional alamiah, seperti desa, daerah aliran sungai, daerah pantai, daerah pegunungan, keluarga, dan keluarga besar, tidak memerlukan Anggaran Dasar karena tipe kelompok sosial budaya tersebut lebih mementingkan kehidupan atas dasar kesatuan tempat dan ikatan alamiah. Tempat dan ikatan alamiah yang sama itulah yang menyatukan mereka. Mengapa warga masyarakat menyatukan diri dalam tipe kelompok sosial budaya berdasarkan kesatuan tempat dan ikatan alamiah? Ada beberapa kemungkinan alasannya, antara lain karena:

1. Mata pencaharian yang sama, sehingga penerapan asas gotong-rojong dan tolong-menolong lebih efektif dan efisien.
2. Keturunan (etnis) yang sama, budaya yang sama yang mengikat mereka, sehingga berkembang rasa solidaritas kelompok untuk hidup bersama dan saling melindungi di tempat yang sama.

Contohnya, desa nelayan biasanya di daerah pantai atau daerah aliran sungai, mata pencaharian mereka sama, budaya nelayan juga sama. Desa petani Bali biasanya di daerah sawah irigasi karena mereka lebih mudah menerapkan sistem subak. Pada desa ini, etnis sama, budaya sama, dan mata pencarian juga sama, yaitu bertani. Pada tipe kelompok sosial budaya berbentuk desa, pola kehidupan mereka lebih bercorak tradisional, ditentukan oleh alam lingkungan, dan cenderung tidak mau mengubah lingkungan karena mereka hidup dari alam lingkungan.

C. Cara Hidup Sosial Budaya

Cara hidup sosial budaya artinya sikap, perbuatan, dan tujuan, serta cara pencapaiannya sudah dipolakan oleh organisasi kelompok dalam seperangkat tuntunan/pedoman tertulis yang disebut Anggaran Dasar dan Kode Etik. Syarat dan prosedur melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan mereka wajib dipatuhi dan disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Kode Etik. Semua anggota yang terikat pada organisasi mereka wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Kode Etik mereka. Dalam Ilmu Sosial Budaya Dasar, Kode Etik merupakan pandangan hidup kelompok sosial yang bersangkutan. Namun, pada kelompok sosial budaya tradisional alamiah, pandangan hidup tidak dibuat dalam bentuk tertulis seperti Kode Etik, tetapi hidup dan berkembang secara alamiah dalam alam pikiran, yang disebut “sistem nilai budaya”.

Sistem nilai budaya kemudian diwujudkan dalam bentuk gagasan dan perbuatan nyata yang sudah berpola. Gagasan dapat berupa rencana atau rancangan untuk membuat atau mengerjakan sesuatu, sedangkan perbuatan nyata berupa kegiatan untuk menghasilkan suatu ciptaan atau produk budaya. Pola ciptaan atau produk budaya tersebut bergantung pada keadaan dimana kelompok sosial budaya itu hidup. Misalnya, pola alat bertani agraris desa di daerah pegunungan berbeda dengan alat bertani nelayan desa di daerah pantai. Pola rumah masyarakat Jawa berbeda dengan pola rumah masyarakat Dayak di Kalimantan. Pola perkawinan masyarakat Lampung berbeda dengan pola perkawinan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Pola pakaian masyarakat Bali berbeda dengan pola pakaian masyarakat Minangkabau.

Nilai budaya kelompok sosial budaya ditentukan oleh tujuan yang akan dicapai, biasanya sudah ditentukan dalam rumusan Anggaran Dasar dan Kode Etik organisasi kelompok yang bersangkutan. Dalam Kode Etik ditetapkan pedoman tindakan atau perbuatan untuk mencapai tujuan. Tindakan atau perbuatan itu biasanya menggambarkan kepedulian kelompok sosial budaya pada kepentingan umum (publik) berupa perlindungan hak masyarakat (publik), antara lain agar tidak dirugikan karena:

1. Pembelian produk yang mengandung cacat tersembunyi (perlindungan konsumen).
2. Pelanggaran hak asasi dalam proses hukum (perlindungan tersangka).
3. Pembelian pupuk yang ternyata dipalsukan (perlindungan petani).
4. Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang ternyata hasil oplosan (perlindungan konsumen).

Selain itu, tindakan atau perbuatan itu juga menggambarkan kepedulian kelompok sosial budaya pada kepentingan umum (publik) berupa pencegahan terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga anggota masyarakat, antara lain agar tidak terjadi perbuatan:

1. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat eksekutif (gerakan antikorupsi).
2. *Money politics* yang dilakukan oleh aparat eksekutif kepada aparat legislatif dalam pemilihan gubernur dan bupati (gerakan antikorupsi).

3. Penyogokan yang dilakukan oleh pihak berperkara kepada aparat yudikatif (gerakan antikorupsi).
4. Maksiat, peledakan bom, bandar/pengedaran narkoba, yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dan merugikan kepentingan masyarakat luas (gerakan antimaksiat, antiteroris, dan antinarkoba).
5. Penggusuran/perampasan hak pedagang kaki lima (K5), pedagang asongan, tukang becak (masyarakat miskin kota).

D. Tujuan Sosial Budaya

Setiap kelompok sosial budaya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Kode Etik kelompok sosial budaya. Pada kelompok sosial budaya tradisional alamiah, tujuan dapat diketahui melalui pola hidup mereka, antara lain pola hidup keluarga, pola hidup desa petani, nelayan, dan daerah aliran sungai. Tujuan setiap kelompok sosial budaya berbeda antara satu sama lain, sesuai dengan tipe kelompok sosial budaya masing-masing.

Atas dasar tersebut, maka tujuan kelompok sosial budaya pada dasarnya dapat dibedakan atau diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Membentuk dan memelihara persatuan dan kesatuan hidup bersama secara tertib dan damai serta sejahtera dalam wadah kesatuan geografis, seperti komunitas desa, komunitas kota, dan komunitas daerah aliran sungai.
2. Membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga bahagia lahir dan batin dalam wadah ikatan perkawinan dan hubungan darah, seperti keluarga dan keluarga besar.

3. Mewujudkan kesejahteraan bersama, menghapuskan kemiskinan, membasmi penyakit masyarakat, dan mencegah tindakan tidak manusiawi dalam wadah kepentingan yang sama, seperti Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan.
4. Melayani kepentingan klien atau konsumen berdasarkan keahlian profesional dalam wadah organisasi profesi, seperti kelompok profesi iptek dan kelompok pengusaha.

2. Ragam Tipe Kelompok Sosial Budaya

A. Kesatuan Geografis

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa tipe kelompok sosial budaya berdasarkan kesatuan geografis, antara lain adalah komunitas desa, komunitas kota, komunitas daerah aliran sungai, dan komputas daerah pantai. Semua tipe kelompok sosial budaya ini umumnya masih terikat dengan pola hidup tradisional alamiah dan bergantung pada alam lingkungan. Kelompok sosial budaya tipe-tipe ini tingkat pendidikan dan penghasilannya masih rendah, belum mampu membudidayakan alam lingkungan mereka.

Walaupun ada di antara tipe kelompok social budaya itu disebut komunitas kota, mereka adalah warga kota berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah dan tidak tetap, antara lain sebagai tukang becak, pemulung, pedagang asongan, pedagang kaki lima, buruh bangunan, pengemis, pengamen, dan lain-lain. Mereka umumnya disebut masyarakat miskin kota (*poor urban society*). Pemerintah belum mampu membimbing dan menyediakan lapangan kerja untuk hidup mereka, walaupun disediakan proyek transmigrasi, tidak lebih dari tempat

pemindahan manusia yang penuh dengan penipuan dan manipulasi proyek.

Masyarakat miskin kota hidup tersebar menurut lingkungan tempat mereka mencari nafkah. Ruang gerak mereka selalu menjadi perhatian dan incaran aparat ketertiban umum (tibum) karena diantara mereka ada yang mencari nafkah berkeliaran di tempat-tempat umum yang strategis, sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum dan kelancaran arus lalu lintas umum, seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, pengamen, ataupun pengemis di jalan umum. Dalam tindakan penertiban yang dilakukan oleh tibum, tidak jarang di antara mereka terkena tindakan keras yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia, seperti perampasan barang jualan milik mereka. Bagaimanapun, hal ini tidak boleh terjadi karena mereka adalah manusia yang juga berupaya bertahan hidup. Karena tersebar di tempat umum, keberadaan mereka mudah dijumpai, tetapi sulit diatasi.

B. Ikatan Perkawinan dan Hubungan Darah

Kelompok sosial budaya berdasarkan ikatan perkawinan dan hubungan darah dikenal hanya 1 (satu) tipe, yaitu keluarga, dan keluarga ini dapat diperluas keanggotannya menjadi keluarga besar. Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang paling awal terjadi dalam kehidupan manusia. Dikatakan paling awal terjadi karena didasarkan pada teori kejadian manusia pertama. Menurut teori kejadian manusia, pria pertama yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini adalah Adam, kemudian diciptakan manusia kedua adalah wanita, yakni Hawa. Perkawinan yang terjadi antara Adam dan Hawa ini melahirkan anak keturunan mereka, sehingga terbentuklah keluarga (*family*). Syarat

terbentuknya keluarga harus ikatan perkawinan antara pria dan wanita, sperma pria membuahi indung telur wanita sehingga terjadi janin yang dikandungnya dan setelah usia kandungan mencapai lebih kurang 9 (sembilan) bulan lahirlah anak mereka. Sejak kelahiran itu terbentuklah tipe kelompok sosial budaya yang disebut keluarga.

C. Kepentingan yang Sama

Kelompok sosial budaya berdasarkan kepentingan yang sama terdiri dari 3 (tiga) tipe, yaitu:

- A. Koperasi, kepentingan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
- B. Lembaga Swadaya Masyarakat, kepentingan yang sama untuk:
 - 1. Melindungi hak masyarakat (publik), seperti Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK).
 - 2. Melindungi hak asasi manusia, seperti Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
 - 3. Membela hak tersangka/tertuduh/terdakwa dalam proses hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
 - 4. Mencegah perbuatan yang merugikan kepentingan umum (publik), seperti *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, Gerakan Anti Narkoba (Geranat), Forum Anti Maksiat (FAM), Masyarakat Miskin Kota (MMK).
- A. Yayasan, kepentingan yang sama untuk:
 - 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yayasan pendidikan dari TK sampai Peruruan Tinggi.
 - 2. Mengayomi dan menyantuni anak yatim piatu, anak cacat seperti yayasan yatim piatu dan yayasan tunanetra.

Mengenai kelompok sosial budaya tipe (a) dan tipe (c) tidak akan dibahas lagi pada kesempatan berikut karena masyarakat pada umumnya sudah mengetahui dan mengerti tentang keberadaan Koperasi dan Yayasan dalam masyarakat. Akan tetapi, mengenai kelompok sosial budaya tipe (b), yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat banyak sekali ragamnya yang memerlukan sekadar penjelasan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengenal manfaatnya serta dapat berkomunikasi guna membela kepentingan umum (publik) yang dirugikan.

a. Lembaga Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan namanya, Lembaga Perlindungan Konsumen merupakan lembaga yang peduli dengan hak-hak masyarakat (publik) yang dirugikan oleh pihak lain, misalnya perusahaan yang menjual produk yang mengandung cacat tersembunyi atau perusahaan yang melakukan pembohongan mutu produk yang dipasarkannya, sehingga konsumen dirugikan. Oleh karena itu, konsumen berhak memperoleh perlindungan, dalam hal ini konsumen dapat berhubungan dengan dan mengadakan nasibnya kepada Lembaga Perlindungan Konsumen agar membantu konsumen yang dirugikan haknya untuk memperoleh ganti kerugian dari perusahaan yang bersangkutan. Perlindungan konsumen kini sudah diatur dengan undang-undang.

b. Komite Nasional Hak Asasi Manusia

Pada zaman Orde Baru banyak terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Begitu parahnya sampai dunia internasional pun menaruh perhatian besar. Guna mencegah jangan lagi terjadi pelanggaran hak asasi manusia, maka dibentuklah suatu badan yang menangani secara khusus apakah suatu peristiwa yang terjadi itu termasuk masalah

pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Badan tersebut diberi nama Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia, maka dibentuk juga peradilan hak asasi manusia. Masalah hak asasi manusia dan peradilan bagi pelanggarannya kini sudah diatur dengan undang-undang, namun pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala.

Berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia:

1. Ketika dilancarkan Gerakan Operasi Militer di Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 80-an yang menelan banyak korban rakyat sipil dan harta benda mereka.
2. Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 berupa penembakan umat yang tidak bersalah oleh pasukan militer, yang menelan banyak korban rakyat sipil dan tidak diketahui dimana kuburan mereka.
3. Peristiwa huru-hara bulan Mei 1998 di daerah pusat perdagangan Glodok Jakarta yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda serta perkosaan terhadap wanita.
4. Ketika pecah perang saudara di Timor Timur tahun 1999 yang berakibat pemisahan Timor Timur dari Republik Indonesia. Betapa banyak korban jiwa dan harta benda akibat pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur.
5. Pembunuhan terhadap Munir yang sampai sekarang belum selesai kasusnya.

Kelima contoh ini termasuk khusus pelanggaran HAM berat.

c. Lembaga Bantuan Hukum

Zaman Orde Baru merupakan era pelanggaran hukum yang banyak sekali dilakukan oleh pejabat/penguasa negara yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Pelanggaran hukum yang banyak terjadi, antara lain di sektor pertanahan dengan dalih untuk keperluan pelaksanaan pembangunan. Betapa banyak tanah pertanian dan pekarangan penduduk kena gusur tanpa ganti kerugian yang layak bahkan tanpa ganti kerugian sama sekali. Hal ini sejalan pula dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, boleh dikatakan rakyat pencari keadilan sulit mengadukan nasibnya karena hukum tidak berpihak kepada rakyat, tetapi kepada penguasa.

Dalam kondisi pelaksanaan dan penegakan hukum yang serba tidak pasti, muncullah sekelompok anggota masyarakat yang terpenggil nuraninya agar peduli terhadap rakyat yang menjadi objek ketidakadilan. Sekelompok anggota masyarakat tersebut adalah para ahli hukum yang idealis, menghimpun diri dan membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Badan ini melayani masyarakat untuk membantu mempertahankan haknya dan menyelesaikan perkaranya, baik di luar maupun di muka pengadilan. Badan ini juga sekaligus mengoreksi tindakan para pejabat negara, mana yang melanggar hukum dan mana yang tidak melanggar hukum. Bagi rakyat yang tidak mampu secara ekonomi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) membantu dengan cuma-cuma. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didirikan pertama kali di Jakarta, kemudian secara bertahap didirikan di daerah-daerah bahkan hampir di setiap provinsi di Indonesia.

d. Lembaga Antikorupsi

Sejak zaman Orde Lama terus memasuki zaman Orde Baru bahkan hingga sekarang, korupsi sudah menjadi budaya yang sulit untuk dihapuskan di Indonesia. Dimana-mana di Indonesia, khususnya di sektor pelayanan masyarakat (publik), korupsi merajalela ibarat kanker yang merasuk ke seluruh tubuh manusia. Dari skala kecil berupa pungutan liar (pungil) di tingkat Kelurahan hingga ke skala besar berupa penyunatan, penggelapan dana proyek pembangunan, sogokan, dan hadiah kepada pejabat dan/atau pemimpin negara di tingkat nasional. Boleh dikatakan orang yang ditunjuk memegang jabatan tertentu, baik politis maupun karier menyempatkan diri mencari kesempatan untuk memperkaya diri tanpa hak melalui perbuatan korupsi. Akibatnya, sangat kentara, rakyat bertambah miskin, hasil pembangunan kurang berkualitas, ekonomi biaya tinggi, dan pejabat negara bertambah kaya.

Untuk mengungkap peristiwa korupsi dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi di kalangan pejabat negara, perlu dicari upaya yang dapat dilakukan secara terus-menerus guna mengurangi, menghambat, dan mencegah kelangsungan perbuatan korupsi. Upaya tersebut, antara lain dilakukan oleh kelompok masyarakat yang peduli terhadap akibat korupsi yang menyengsarakan rakyat banyak, dengan mendirikan suatu Lembaga Anti Korupsi, seperti KPK Badan ini secara sukarela dan objektif berupaya mengungkap perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh pejabat negara, dengan memberikan bukti-bukti konkret guna diselesaikan melalui jalur hukum, KPK, juga melakukan pengawasan publik (*public control*) terhadap kinerja pejabat negara guna menghambat dan mencegah terjadinya korupsi.

e. Gerakan Anti narkoba

Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang menjadi sasaran pengedaran narkoba. Karena berpenduduk padat, maka Indonesia dijadikan daerah peredaran narkoba oleh pembuat dan pengedarnya dengan harapan banyak konsumennya. Narkoba adalah singkatan dari Narkotik Obat Berbahaya, merupakan bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia apabila dikonsumsi secara biasa oleh manusia sehat. Kini peredaran narkoba secara tidak sah sudah meluas, tidak hanya di kalangan pengunjung pusat-pusat hiburan malam, tetapi juga di kalangan pelajar dan mahasiswa di sekolah dan di kampus secara sembunyi-sembunyi. Apabila hal ini tidak diupayakan pencegahannya, sudah dapat diperhitungkan berapa banyak calon korban mati konyol secara disengaja di kalangan para pelajar, mahasiswa, ataupun muda-mudi generasi penerus kehidupan bangsa.

Salah satu upaya untuk mencegah peredaran dan konsumsi narkoba, kelompok masyarakat yang peduli dan sadar akan bahaya narkoba membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang disebut Gerakan Anti Narkoba, disingkat Geranat. Gerakan ini berupaya membantu pemerintah aparat yang berwajib memerangi narkoba dengan cara menyelidiki kegiatan peredaran narkoba di pusat-pusat kegiatan masyarakat, seperti pelabuhan, bandara, tempat hiburan, hotel, sekolah, dan kampus. Hasil penyelidikan tersebut kemudian diinformasikan kepada aparat yang berwajib (kepolisian) untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penindakan. Gerakan pencegahan narkoba juga dilakukan oleh beberapa kampus dengan cara memeriksa urine calon mahasiswa

baru dan jika mereka terbukti sebagai konsumen narkoba, tidak akan diterima menjadi mahasiswa sebelum bebas dari narkoba.

f. Peduli Masyarakat Miskin Kota

Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln dulunya orang miskin dia meniti karier dari masyarakat miskin pernah menjadi penjaga toko, nahkoda, terjun ke dunia politik akhirnya sukses, tidak kalah pengusaha sukses Lim Swi Liong, pada saat datang ke Indonesia umurnya baru 22 tahun, pertama sebagai penjaga toko di Semarang, karena desakan ekonomi akhirnya bangkit menjadi orang kaya yang memiliki berbagai bisnis di Indonesia dan China.

Orang miskin mempunyai hal yang positif antara lain :

1. Nekat, kebanyakan orang miskin ini nekat untuk melakukan sesuatu karena memiliki keberanian yang luar biasa
2. Tidak bisa menghabiskan kekayaan, karena memang tidak ada yang bisa dihabiskan berbeda dengan orang kaya yang pandai menghabiskan kekayaan karena ada yang dipergunakan untuk menghabiskan,
3. Intrpreneur, mengembangkan usaha dari bawah tidak hanya sebagai penonton tetapi sebagai pelaksana
4. Menggunakan orang miskin sebagai semangat untuk menuju sukses

Diantara kelompok sosial budaya yang hidup di kota adalah mereka yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap serta bertempat tinggal di lingkungan kumuh (*slum area*). Mereka ini sering disebut masyarakat miskin kota. Mereka bertebaran di kota mencari nafkah untuk bertahan

hidup, dan kadang-kadang juga menjadi sumber tidak tertibnya lalu lintas kendaraan umum dan juga sumber kejahatan, seperti penodongan. Untuk mengatasi hal tersebut, aparat pemerintah kota (tibus) dan pihak kepolisian secara rutin melakukan penertiban terhadap mereka bahkan dapat terjadi tindakan yang tidak manusiawi.

Untuk membela kelompok miskin ini, maka muncullah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan nasib mereka dan berupa membantu dan memperjuangkan hak-hak mereka untuk bertahan hidup yang bebas dari penindasan pihak yang kuat atau bebas dari tindakan tidak manusiawi dari pihak aparat pemerintah kota. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini disebut Peduli Masyarakat Miskin Kota (Peduli MMK). Dalam upaya kepedulian terhadap kelompok miskin tersebut. Peduli MMK dapat mengoordinasikan perjuangan mereka, antara lain melakukan tindakan bersama menghadapi pihak aparat pemerintah kota guna mencegah penggusuran tempat tinggal, tempat usaha, dan perampasan milik dagangan mereka, seperti perampasan becak, gerobak jualan, ataupun barang jualan. Mereka memandang tindakan tersebut tidak manusiawi. Orang sudah miskin dibuat tambah melarat yang seharusnya dibantu untuk bertahan hidup sesuai dengan hak asasi manusia.

3. Keahlian dan Profesional

Kelompok sosial budaya berdasarkan keahlian dan profesional terdiri dari 3 (tiga) tipe menurut kelompok bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu:

- a. Kelompok profesi bidang ilmu alamiah, untuk melayani kepentingan masyarakat. Tipe ini antara lain meliputi profesi

kedokteran, profesi apoteker, profesi keteknikan, dan profesi pertanian, profesi komputer.

- b. Kelompok profesi bidang ilmu sosial, untuk melayani kepentingan masyarakat. Tipe ini antara lain meliputi profesi hukum, profesi ekonomi, profesi psikologi, dan profesi sosial politik.
- c. Kelompok profesi pengetahuan budaya, antara lain profesi keagamaan, profesi sejarah/purbakala, profesi kesenian, dan profesi kesusasteraan.

Walaupun berbasis keahlian profesional, kelompok sosial budaya ini dalam praktik mengemban profesi masih banyak melakukan kelalaian atau tindakan yang tidak manusiawi yang akibatnya merugikan konsumen, atau pasien, atau klien. Bahkan, ada yang secara terang-terangan mengabaikan Kode Etik yang seharusnya menjadi acuan dan pedoman kerja mereka. Dalam hal ini Dewan Kehormatan yang mereka bentuk untuk melakukan pengawasan sepertinya tidak berfungsi baik, karena bagaimanapun juga adalah 1 (satu) korp. Oleh karena itu, perlu ada kelompok sosial budaya yang berperan mengontrol kinerja profesi mereka agar tidak menimbulkan perilaku yang tidak manusiawi atau merugikan kepentingan masyarakat.

Contohnya, rumah sakit/dokter yang kurang tanggap terhadap atau tidak baik melayani pasien yang dimintakan perawatannya karena pasien yang bersangkutan orang miskin. Hakim yang memutus perkara tidak adil karena dipengaruhi oleh sogokan. Kontraktor yang membangun gedung tidak memenuhi standar sesuai dengan rencana bangunan, sehingga ambruk karena anggarannya dikorupsi. Akuntan publik yang mengaudit keuangan perusahaan mengikuti maunya selera Direksi karena hanya mengharapkan bayarannya, dan masih banyak lagi.

Kontrol terhadap kinerja para profesional ini dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen. Lembaga Anti Korupsi, atau kontrol langsung oleh anggota masyarakat yang terkena, misalnya melalui tulisan di media massa.

BAB 8

PERUBAHAN SISTEM NILAI BUDAYA

DAN MASALAH KEMANUSIAAN

1. Perubahan Sistem Nilai Budaya

A. Kesatuan Sistem Nilai Budaya

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, sistem nilai budaya adalah konsepsi-konsepsi tentang nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota/warga masyarakat, dan berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi sikap mental, cara berpikir, dan tingkah laku mereka. Sistem nilai budaya tersebut adalah hasil pengalaman hidup yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sehingga menjadi kebiasaan yang berpola. Sistem nilai budaya yang sudah berpola itu meliputi segala aspek nilai kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat adalah pola kehidupan yang berkelompok dalam bentuk-bentuk tertentu karena:

- a. Ikatan perkawinan dan keturunan darah, seperti keluarga;
- b. Kesatuan geografis, seperti desa, dan marga;
- c. Kesamaan asal-usul, seperti etnis Melayu, Cina, dan Sunda;
- d. Kesamaan kepentingan dan tujuan, seperti subak, organisasi pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM); serta
- e. Kesamaan keahlian dan keterampilan, seperti profesi keilmuan.

Sistem nilai budaya yang sudah berpola merupakan gambaran sikap, pikiran, dan tingkah laku anggota/warga yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat. Setiap anggota/warga masyarakat menyesuaikan diri dengan sistem nilai

budaya mereka yang sudah berpola itu Sistem nilai budaya tersebut adalah produk budaya hasil pengalaman hidup yang berlangsung terus-menerus, terbiasa yang akhirnya disepakati bersama sebagai pedoman hidup mereka, dan sebagai identitas kelompok masyarakat. Sistem nilai budaya yang sudah berpola itu, antara lain mengenai:

- a. Struktur kelompok masyarakat;
- b. Bentuk rumah dan anggota penghuninya;
- c. Perkawinan dan proses pelangsungannya;
- d. Etika dan tata krama dalam pergaulan hidup;
- e. Bahasa dan tutur kata dalam komunikasi;
- f. Bentuk dan cara berpakaian serta penggunaannya, dan
- g. Tata tertib makan dan minum (jenis, cara, dan penyajiannya).

Pengalaman nyata mereka peroleh dalam hubungan dan interaksi sesama anggota masyarakat mengandung nilai-nilai yang menyatukan dan memperkuat kesatuan mereka dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai hidup tersebut terus menjadi kenangan yang tidak terlupakan, harapan menatap masa depan yang lebih cerah. Belajar dari pengalaman menempuh tahap perkembangan dan konflik yang telah dialami oleh anggota keluarga, kemudian diturunkan pula kepada leluhur dan menjadi acuan pula bagi generasi. Pada beberapa pola pertumbuhan keluarga yang berkembang, anggota keluarga yang memiliki perspektif dan kepedulian terhadap fase dan pola pertumbuhan keluarga, adalah cara utama menyadarkan diri siapa mereka, sanggup mengatasi krisis keluarga, tabah, dan mempertahankan pandangan hidup keluarga. Pandangan hidup yang dimaksud adalah sistem nilai budaya.

B. Alasan Perubahan Sistem Nilai Budaya

Perubahan sistem nilai budaya mengalami perkembangan yang pesat.

Alasan mendasar terjadi perubahan sistem nilai budaya, yaitu:

- a. Jarak komunikasi antara kelompok etnis,
- b. Pelaksanaan pembangunan
- c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi

Mengenai hal tersebut, berikut ini akan diuraikan satu demi satu.

a. Jarak komunikasi antara kelompok etnis

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis/suku bangsa dengan segala keanekaragaman budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupannya, biasanya tidak lepas dari ikatan primordial, kesukuan, dan kedaerahan. Secara jujur diakui masih terdapat jarak komunikasi antara kelompok etnis, hal yang sering menimbulkan konflik budaya pada seseorang yang bergerak dari satu kelompok etnis ke kelompok etnis yang lain. Contohnya adalah kelompok etnis yang satu berpindah mencari nafkah ke daerah kelompok etnis yang lain (migrasi), mungkin menimbulkan pergeseran sistem nilai budaya yang sudah ada di daerah kelompok etnis penduduk asli, misalnya menganggap rendah status etnis pendatang (negatif), tetapi mungkin juga etnis pendatang menjadi penggerak pembangunan di daerah kelompok etnis penduduk asli (positif).

Anggota kelompok etnis yang menganut budaya keluarga parental terpilih menjadi pemimpin kelompok etnis yang menganut budaya keluarga patrilineal. Pemimpin yang terpilih ini dapat menimbulkan pergeseran sistem nilai budaya pada kelompok etnis yang dipimpinnya, yaitu berupaya berangsur-angsur menyetarakan status

suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Hal ini tentunya akan ditentang oleh kelompok etnis yang menganut budaya Keluarga patrilineal yang merendahkan status istri. Apa yang digagaskan oleh pemimpin tersebut dianggap negatif dan tidak perlu didukung. Padahal, sebagian anggota masyarakat menghendaki kesetaraan status antara suami dan istri guna menghindari kepala keluarga yang cenderung bersikap otoriter dalam keluarga mereka. Disamping itu, mungkin juga terjadi bahwa etnis pendatang dianggap mempunyai status lebih rendah dalam kehidupan masyarakat etnis penduduk asli.

Peristiwa perkawinan antaretnis dapat menimbulkan pergeseran sistem nilai budaya. Pergeseran tersebut misalnya muncul sistem nilai baru yang berlainan dengan yang sudah ada pada pihak keluarga suami dan pada pihak keluarga istri. Sistem nilai budaya yang baru dan berkembang di lingkungan keluarga hasil perkawinan etnis campuran dapat lebih kuat pengaruhnya, lebih maju pola kehidupannya, dan lebih banyak unsur positif yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan keluarga campuran tersebut. Di sisi lain, dapat pula terjadi kemungkinan gagalnya keluarga baru tersebut karena terlalu kuat dipengaruhi oleh salah satu atau kedua pihak keluarga suami dan/atau keluarga istri.

Konflik budaya yang dapat terjadi masih bertaraf lokal yang tidak begitu luas pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, paling banter hanya terjadi antar keluarga atau antar suku yang bersangkutan. Kendatipun terjadi konflik, masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan menurut adat kebiasaan setempat. Segi positif perubahan sistem nilai selalu ada, dan dapat ikut menyelesaikan dan menetralisasi konflik yang terjadi atau yang akan terjadi.

Apabila konflik budaya tersebut meningkat ke taraf nasional, akibat yang dapat terjadi adalah rasa ketidakpedulian terhadap sesama komponen bangsa makin berkembang, rasa persatuan dan kesatuan makin mengendur, rasa tanggung jawab nasional makin berubah menjadi bersifat kedaerahan dan kesukuan. Semuanya itu akan mengarah pada keretakan persatuan dan kesatuan bangsa yang akhirnya berakibat perpecahan. Konflik semacam ini lebih luas pengaruhnya dan berbahaya, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan bijaksana.

Konflik bertaraf nasional dapat terjadi, antara lain akibat:

1. Pelaksanaan pembangunan fisik tidak merata di seluruh daerah wilayah Indonesia.
2. Pemimpin nasional kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat di daerah.
3. Penerapan hukum tidak menjamin kepastian hukum yang adil.
4. Penegakan hukum tidak berakar pada hukum yang hidup dalam masyarakat.
5. Pengangkatan pemimpin nasional cenderung didominasi oleh kelompok etnis besar.

Jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin terlalu lebar, kelompok kaya umumnya berasal dari para pejabat yang korupsi.

2. Pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan yang berlangsung terus-menerus bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup keluarga/masyarakat/bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembangunan tersebut dapat menimbulkan perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya yang tentunya akan berpengaruh pula pada sikap mental, pola

pikir, dan pola perilaku keluarga/masyarakat/bangsa Indonesia. Perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya disatu sisi dapat menjadi pendorong ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik, tetapi di sisi lain dapat menjadi bumerang yang memosisikan manusia sebagai objek yang kehilangan nilai kemanusiannya, bahkan dilanggar hak asasinya.

Perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya dapat mendorong ke arah perbaikan dan peningkatan kualitas dari:

1. Pola hidup tradisional, konvensional, dan bertaraf lokal yang berbau mistis, berubah menjadi pola hidup modern bertaraf nasional/internasional yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pola hidup sederhana yang hanya bergantung pada alam lingkungan, meningkat menjadi pola hidup modern yang mampu menguasai alam lingkungan dengan dukungan prasarana dan sarana serta teknologi.
3. Pola hidup makmur yang hanya kecukupan sandang, pangan, dan perumahan meningkat menjadi pola hidup makmur dan juga sehat, teratur, bersih, dan senang serta aman sesuai dengan standar menurut ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Kemampuan kerja yang hanya berbasis kekuatan fisik dan pengalaman, meningkat menjadi kemampuan kerja berbasis keahlian, dan keterampilan yang didukung teknologi.

Perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya dapat mengurangi, menghapuskan hak, dan memosisikan manusia sebagai objek, bukan subjek, antara lain seperti berikut:

1. Penggusuran hak milik seseorang untuk kepentingan pembangunan tanpa prosedur hukum yang pasti dan tanpa ganti kerugian yang layak, bahkan tanpa ganti kerugian sama sekali.
2. Mengurangi atau meniadakan arti kemanusiaan seseorang, memandang manusia sebagai objek sasaran yang selalu dikenai penertiban, serta hak asasinya tidak dihargai.
3. Tindakan sewenang-wenang dan tidak ada kepastian hukum dalam hubungan antara penguasa/pejabat/majikan dengan rakyat/bawahan/buruh.

Pengaruh tersebut akhirnya menciptakan kemiskinan dan kebodohan yang justru bertentangan dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan konflik dengan tata nilai budaya yang sudah ada, perubahan kondisi kehidupan manusia, sehingga manusia bingung sendiri terhadap kemajuan yang telah diciptakan. Hal ini merupakan akibat sifat ambivalen teknologi, yang selain memiliki segi positif, juga memiliki segi negatif. Sebagai dampak negatif teknologi, manusia menjadi resah. Keresahan manusia muncul akibat adanya benturan nilai teknologi modern dengan nilai-nilai tradisional (konvensional). Ilmu pengetahuan dan teknologi berpijak pada suatu kerangka budaya. Kontak budaya yang ada dengan budaya asing menimbulkan perubahan orientasi budaya yang mengakibatkan perubahan sistem nilai budaya.

Kontak budaya dapat terjadi akibat kemajuan teknologi informasi global, seperti media elektronik yang menyajikan bermacam informasi secara bebas melalui televisi yang menggunakan antena parabola atau

melalui internet yang menggunakan satelit komunikasi. Disamping itu, kontak budaya dapat juga terjadi akibat kemajuan teknologi grafika, seperti media cetak yang menyajikan bermacam informasi secara terbuka melalui surat kabar, majalah, jurnal, serta buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi yang diperoleh melalui tontonan televisi, dan bacaan media cetak dapat menciptakan kondisi kehidupan baru, yang sebelumnya tidak dikenal.

Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dengan segala macam produk kontrasepsi dapat mengarahkan perilaku seksual (*sexual behaviour*) kalangan remaja dan orang dewasa ke pergaulan bebas tanpa kontrol (segi negatif) atau meningkatkan kesejahteraan keluarga karena berhasil melaksanakan keluarga berencana (segi positif). Gencarnya promosi produk melalui media elektronik dapat mengubah pola hidup dari produktif menjadi konsumtif, pola hidup hemat menjadi boros (segi negatif). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong penciptaan dan penemuan hak kekayaan intelektual yang menjadi basis perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan (segi positif).

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi transportasi dengan segala macam produk otomatis dan penggunaan alat pengangkut lainnya memudahkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain guna memenuhi segala macam kebutuhan hidup anggota masyarakat. Kelancaran arus lalu lintas seperti mendekatkan jarak antara kota dan desa, mencegah atau mengurangi arus urbanisasi karena orang yang tinggal di desa dapat bekerja di kota tanpa harus pindah ke kota.

Disamping itu, kelancaran arus lalu lintas mempercepat pula arus informasi media massa dari kota ke desa yang berarti mengurangi kesenjangan informasi antara orang kota dan orang desa. Namun, diakui pula kekurangannya, yaitu belum meratanya prasarana dan sarana pengangkutan di semua daerah, sehingga masih ada daerah yang sulit dijangkau karena belum ada atau masih langkanya pengangkutan. Lalu lintas yang semrawut karena rendahnya disiplin pengemudi mengakibatkan tingginya angka kecelakaan yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta.

4. Dampak Perubahan Sistem Nilai Budaya

Apabila sistem nilai budaya mengalami perubahan, akan terjadi pula perubahan sikap mental, pola pikir, dan pola tingkah laku anggota/warga masyarakat dalam berbagai aspek nilai kehidupan. Perubahan sistem nilai budaya dapat berakibat positif, yaitu memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, mendorong ke arah kemajuan, dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Disamping itu, perubahan sistem nilai budaya dapat pula berakibat negatif, yaitu merusak nilai kehidupan yang sudah ada, menghambat kemajuan, memperburuk kehidupan, dan merugikan masyarakat, sehingga terjadi krisis kemasyarakatan.

Krisis tersebut dapat mengurangi bahkan menghapuskan arti kemanusiaan seseorang. Akibat negatif perubahan sistem nilai budaya disebut "masalah kemanusiaan". Jadi, masalah budaya adalah masalah yang berkenaan dengan perubahan sistem nilai budaya, sedangkan masalah kemanusiaan adalah masalah yang berkenaan dengan akibat negatif perubahan sistem nilai budaya. Dengan kata lain, masalah

kemanusiaan timbul akibat masalah budaya dan masalah budaya timbul akibat perubahan sistem nilai budaya.

Ungkapan masalah kemanusiaan dan masalah budaya meliputi berbagai aspek kehidupan yang tidak manusiawi. Keseluruhannya bermula dalam lingkungan kehidupan keluarga sebagai unit masyarakat terkecil dan kemudian berkembang ke dalam lingkungan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Berbagai aspek kehidupan yang tidak manusiawitu merupakan gambaran krisis subjektif yang terdapat dalam diri manusia, kemudian berkembang melalui pergaulan hidup, dan diungkapkan sebagai pola sikap dan perbuatan yang merugikan kehidupan manusia, merendahkan martabat manusia, atau bahkan menghilangkan arti kemanusiaan.

Beberapa contoh nilai kehidupan tidak manusiawi yang banyak terjadi dan dijumpai dalam masyarakat, antara lain adalah:

- a. Perjudian, ketagihan miras, kecanduan narkoba, dan perkosaan wanita;
- b. Perampasan hak orang lain, penyerobotan tanah seenaknya;
- c. Bertindak kejam, tidak menghargai orang lain;
- d. Berbuat onar, meresahkan masyarakat;
- e. Perlakuan buruk terhadap tenaga kerja, pelecehan seksual; serta
- f. Perlakuan kejam terhadap istri, anak, dan orangtua.

Berbagai aspek kehidupan manusia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) ungkapan, yaitu ungkapan aspek kehidupan manusiawi dan ungkapan aspek kehidupan tidak manusiawi. Aspek kehidupan manusiawi diungkapkan sesuai dengan sistem nilai budaya sebagai pandangan hidup, melalui sikap dan perbuatan yang saling menyayangi,

melindungi, menghargai, menguntungkan, menyenangkan, dan membahagiakan, yang dirasakan sebagai keindahan hidup. Aspek kehidupan tidak manusiawi diungkapkan melalui sikap dan perbuatan yang merugikan, menggelisahkan, dan menjadikan manusia menderita karena dirasakan tidak adil, tidak bertanggung jawab, jelek, dan jahat. Ungkapan berbagai aspek kehidupan tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa tema pengkajian ilmu Sosial Budaya Dasar.

5. Masalah Kemanusiaan

A. Hakikat Manusia Sama

Hakikat manusia sama berasal dari Tuhan Sang Pencipta segala makhluk dan alam semesta. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia diberi akal, perasaan, dan kehendak yang menyatakan kesempurnaannya sebagai makhluk budaya. Makhluk budaya sifatnya selalu menginginkan yang benar, yang baik, dan yang bermanfaat bagi kehidupan bersama sesuai dengan kemampuannya. Sifat ini disebut "manusiawi". Semua manusia di muka bumi ini diciptakan sama (*all human beings are created equal*), semuanya memiliki kesamaan kodrati, yaitu akal, perasaan, dan kehendak sebagai ciri makhluk budaya dan manusiawi. Kesamaan tersebut menunjukkan eksistensi universal manusia dimana saja. Oleh karena itu, timbul ungkapan "hakikat manusia sama dan universal".

Namun, dalam menghadapi lingkungan alam dan sosial budaya, manusia tidak hanya mewujudkan kesamaan, tetapi juga ketidaksamaan dan ketidakseragaman, yang diungkapkan dalam berbagai bentuk dan corak pikiran, perasaan, perbuatan, dan hasil pikiran serta perbuatannya itu. Karena manusia itu makhluk sosial yang mengharuskannya hidup bermasyarakat, maka corak pikiran, perasaan, dan perbuatan yang tidak

sama atau tidak seragam akan menghasilkan penilaian dan nilai-nilai yang disatu sisi bermanfaat dan menguntungkan, sedangkan di lain sisi tidak bermanfaat dan merugikan kehidupan bersama atau kehidupan manusia. Corak pikiran, perasaan, dan perbuatan yang bermanfaat dan menguntungkan bagi kehidupan manusia, sifatnya manusiawi, sedangkan yang tidak bermanfaat, merugikan bagi kehidupan manusia, sifatnya tidak manusiawi.

Untuk mengontrol corak pikiran, perasaan, dan perbuatan mana yang manusiawi dan mana yang tidak manusiawi, manusia sebagai makhluk budaya berupaya menciptakan kesatuan pandangan guna mencegah terjadinya sesuatu yang tidak manusiawi. Kesatuan pandangan ini merupakan hasil kesepakatan bersama dan diakui sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang dijadikan pedoman hidup bersama, mengarahkan sikap dan perbuatan manusia pada kehidupan manusiawi dan mencegah sikap serta perbuatan yang tidak manusiawi. Nilai kemanusiaan yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat biasa disebut sistem nilai budaya.

B. Manusia Sebagai Subjek dan Objek

Dalam pengkajian masalah kemanusiaan, manusia menempati posisi ganda, artinya manusia tidak hanya sebagai subjek (pelaku), tetapi juga sebagai objek (sasaran). Tema pengkajian masalah kemanusiaan diarahkan pada:

- a. Diri manusia sendiri dan nilai kemanusiaan.
- b. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta.

Atas dasar pengkajian tema tersebut akan dapat dipahami sikap dan perbuatan manusiawi dan tidak manusiawi, sesuai dengan etika pergaulan dan melanggar etika pergaulan, sesuai dengan hukum kebiasaan dan melanggar hukum kebiasaan.

Tema pengkajian dari manusia sendiri, akan terungkap gambaran krisis subjektif aspek kehidupan tidak manusiawi, yang hanya dapat dipahami melalui sikap dan perbuatan nyata kepada alam lingkungan dan kepada sesama manusia. Sikap dan perubahan nyata tersebut dapat berupa perusakan/pencemaran berat terhadap alam lingkungan yang merugikan manusia dan makhluk lain. Sikap dan perbuatan nyata dapat berupa kebencian, kekejaman, penyiksaan, tidak adil dan tidak bertanggungjawab yang merugikan, menggelisahkan, serta menjadikan manusia menderita dalam hubungan dengan sesama manusia. Dalam ungkapan gambaran krisis subjektif aspek kehidupan tidak manusiawi, manusia menempati posisi objek perbuatan, yaitu sasaran yang dirugikan, teraniaya, tertindas, tersiksa, dan tidak adil.

Pengkajian diri manusia sendiri juga akan mengungkapkan berbagai aspek kehidupan manusiawi. Aspek kehidupan manusiawi diungkapkan melalui sikap dan perbuatan yang sesuai dengan sistem nilai budaya sebagai pedoman hidup, yaitu saling menyayangi, melindungi, menghargai, menguntungkan, menyenangkan, dan membahagiakan yang dirasakan sebagai keindahan hidup. Dalam ungkapan gambaran objektif aspek kehidupan manusiawi, manusia menempati posisi subjek perbuatan, yaitu pelaku terhormat, adil, menguntungkan, menyenangkan, dan membahagiakan semua pihak.

C. Tema Kajian Masalah Kemanusiaan

Apabila ungkapan aspek kehidupan manusia digabungkan dengan aspek kehidupan tidak manusiawi, akan menghasilkan tema kajian yang mempunyai 2 (dua) ciri yang berlawanan. Tema kajian tersebut, antara lain adalah:

- a. Keindahan dan keburukan;
- b. Kasih sayang dan kebencian;
- c. Tanggung jawab dan ketidakpedulian;
- d. Keadilan dan kesewenang-wenangan;
- e. Kegelisahan dan ketenteraman;
- f. Penderitaan dan kebahagiaan; serta
- g. Harapan dan keberhasilan

Tema kajian masalah kemanusiaan selain dapat dipahami melalui fakta dan pengalaman nyata, dapat juga dipahami melalui naskah karya budaya, yang banyak mengungkapkan peristiwa dan pernyataan yang dianggap unik, antara lain:

- a. Kitab suci dan buku-buku agama, seperti Alquran, Injil, Wedha, dan Fiqih yang mengungkapkan tentang adanya keadilan azab, dan tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
- b. Karya sastra, seperti novel, cerita pendek, dan puisi yang mengungkapkan tentang kasih sayang, penderitaan, kegelisahan, dan harapan.
- c. Karya seni, seperti kaligrafi, lukisan, pahatan, dan lirik lagu, yang mengungkapkan keindahan, kasih sayang, kebahagiaan, kegelisahan, dan penderitaan.

- d. Media massa, seperti koran, majalah, buku, televisi, dan radio yang mengungkapkan tentang korban perang, korban banjir, serta perilaku manusiawi dan tidak manusiawi.
- e. Karya filsafat, yang mengungkapkan tentang pandangan hidup, kebenaran dan keadilan, serta harapan dan optimisme.
- f. Putusan hakim (yurisprudensi), yang mengungkapkan perbuatan manusia yang benar atau salah, adil dan zalim, dan manusia atau tidak manusiawi.

BAB 9

MASYARAKAT DAN PANDANGAN HIDUP

1. Konsep Pandangan Hidup

Setiap masyarakat mempunyai pandangan hidup yang menjadi arah dan penentu masa depan mereka. Pandangan hidup adalah hasil pemikiran dan pengalaman yang berupa nilai-nilai kehidupan yang memberi manfaat, sehingga dijadikan pegangan, pedoman, pengarahan, atau petunjuk hidup. Pandangan hidup tidak timbul dalam waktu singkat, tetapi melalui proses pengalaman yang terus-menerus dan lama, sehingga nilai-nilai kehidupan tersebut sudah teruji dalam penerapannya. Hasil pengujian itu dapat diterima oleh akal dan diakui kebenarannya. Atas dasar ini, anggota masyarakat menerima hasil pemikiran yang berupa nilai-nilai kehidupan itu sebagai pegangan, pedoman, pengarahan, atau petunjuk yang disebut pandangan hidup. Dilihat dari segi pola kehidupan masyarakat, pandangan hidup digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu pandangan hidup tradisional dan pandangan hidup modern.

a. Pandangan Hidup Tradisional

Pandangan hidup tidak akan dapat berfungsi secara wajar jika tidak digunakan dalam hidup bermasyarakat. Manusia yang hidup menyendiri, seperti dalam cerita lama, tidak mampu memfungsikan secara wajar pandangan hidupnya, mengembangkan budaya sendiri saja sulit karena tidak ada yang ditirunya dari manusia lain. Akan tetapi, apabila manusia itu hidup bermasyarakat, akan terjadi suatu proses interaksi yang teratur guna mewujudkan tujuan hidup bersama. Keteraturan tersebut dipenuhi oleh setiap anggota masyarakat karena

dipandang baik, benar, bermanfaat, dan menguntungkan semua pihak dalam mencapai tujuan hidup bersama.

Keteraturan itu dijadikan pedoman hidup bersama dan berlangsung terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan yang membudaya. Jika ada anggota masyarakat yang mengingkari keteraturan tersebut, dia akan diberi arahan agar mematuhi keteraturan itu. Jika yang bersangkutan masih juga membangkang, masyarakat akan mengucilkannya dari kehidupan bersama, yang berarti mempersulit kehidupan sendiri. Biasanya si pembangkang itu akan menyadari kekeliruan karena hal itu tidak akan memberi manfaat bagi dirinya. Dalam Ilmu Sosial Budaya Dasar, pandangan hidup masyarakat ini biasa disebut sistem nilai budaya. Karena berkembang secara turun-temurun sesuai dengan tradisi masyarakat, maka sistem nilai budaya ini disebut juga pandangan hidup tradisional.

Pandangan hidup tradisional merupakan gambaran pola hidup berdasarkan berbagai macam norma kehidupan tradisional, seperti:

- a. Norma kehidupan keagamaan disebut pandangan hidup tradisional religius;
- b. Norma kehidupan kekeluargaan disebut pandangan hidup tradisional kekeluargaan;
- c. Norma kehidupan gotong-royong disebut pandangan hidup tradisional gotong royong;

Sesuai dengan pola tradisi budaya yang menjadi dasar dan pedoman kehidupan masyarakat setempat. Jadi, pandangan hidup tradisional didasarkan pada nilai tradisi yang berkembang secara turun-temurun

yang oleh masyarakat dianggap bermanfaat, sehingga dijadikan pedoman hidup mereka.

b. Pandangan Hidup Modern

Pandangan hidup modern selalu dikaitkan dengan kehidupan modern yang berbasis organisasi atau partai politik. Apabila pandangan hidup itu diterima oleh sekelompok orang sebagai pendukung suatu organisasi, pandangan hidup itu disebut ideologi. Apabila organisasi itu organisasi politik, pandangan hidupnya disebut ideologi politik. Apabila organisasi itu adalah negara, pandangan hidupnya disebut ideologi negara. Berbeda dengan pandangan hidup tradisional yang didasarkan atas keteraturan dan kesadaran, maka pandangan hidup modern didasarkan atas kekuasaan yang intinya kekuatan dan paksaan.

2. Berbagai Tipe Pandangan Hidup

Berdasarkan hasil pengkajian, di dunia ini terdapat bermacam-macam pandangan hidup modern yang dianut kelompok manusia, yang umumnya terhimpun dalam organisasi negara. Pandangan hidup tersebut dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam sebagai berikut:

a. Pandangan Hidup Liberalisme

Menurut ajaran pandangan hidup ini, setiap anggota organisasi atau warga negara bebas berusaha guna mewujudkan kesejahteraan berdasarkan nilai kehidupan liberal yang dianutnya. Sifat yang menonjol adalah kebebasan bersaing antara individu yang satu dan individu yang lain. Setiap individu bebas berusaha mencari dan memiliki kekayaan tanpa batas. Hak asasi manusia dihargai dan dijunjung tinggi. Pandangan

hidup liberalisme dianut oleh orang Barat, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda.

b. Pandangan Hidup Sosialisme

Menurut ajaran pandangan hidup ini, anggota organisasi atau warga negara berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan tidak secara individual, tetapi dengan menekankan pada prinsip kebersamaan secara kolektif, kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan oleh negara. Warga negara masih bebas memiliki kekayaan sampai batas tertentu yang ditetapkan oleh negara. Hak asasi manusia diakui sesuai dengan asas kebersamaan. Pandangan hidup sosialisme dianut oleh orang Barat dan orang Timur, antara lain Rusia, Yugoslavia, Hongaria, Ethiopia, Uganda, Zimbabwe, Laos, dan Kamboja.

c. Pandangan Hidup Komunisme

Menurut ajaran pandangan hidup ini, negara lebih berperan mengatur usaha/perjuangan warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh pada prinsip yang ditetapkan negara. Asas kebersamaan, pemerataan, sama rata sama rasa diterapkan secara ketat. Semua alat produksi dimiliki dan diatur oleh negara. Setiap orang tidak boleh memiliki kekayaan melebihi batas yang ditetapkan oleh negara. Tidak ada jaminan kebebasan hak asasi manusia. Cara mewujudkan kesejahteraan tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Manusia tidak lebih dari alat produksi untuk menghasilkan kesejahteraan (kemakmuran). Pandangan hidup komunisme dianut oleh orang Barat juga orang Timur, antara lain Kuba, Cina, Vietnam, dan Korea Utara.

d. Pandangan Hidup Religius

Menurut ajaran pandangan hidup ini, anggota organisasi atau warga negara berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan prinsip yang diajarkan oleh agama yang mereka anut. Pandangan hidup religius dianut oleh orang Barat, orang Timur Tengah, dan orang Timur, antara lain Vatikan, Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan Brunai Darussalam.

e. Pandangan Hidup Sosialisme Religius

Menurut ajaran pandangan hidup ini, anggota organisasi atau warga negara berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama secara kolektif berdasarkan prinsip kebersamaan yang sesuai dengan ajaran agama, dan diridai oleh Tuhan. Pandangan hidup sosialisme religius dianut orang Timur Tengah dan orang Timur, antara lain Mesir, Siria, Libya, Irak, Indonesia, Muang Thai, Bangladesh, dan Malaysia.

BAB 10

KEMISKINAN DAN PERMASALAHANNYA

1. Kemiskinan

Sejak dulu kemiskinan sudah menjadi perhatian serius, terutama dalam usaha-usaha melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada berbagai strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah berbagai negara/daerah, umumnya menempatkan pencegahan dan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu tujuan utamanya. Sejak itu berbagai studi dan penelitian mengenai kemiskinan banyak dilakukan, baik oleh ilmuwan sosial maupun oleh ilmuwan ekonomi.

Pandangan berdasarkan konsumsi mendefinisikan kemiskinan dari sudut nilai konsumsi yang dikeluarkan seseorang. Dikaitkan dengan kesejahteraan dalam hal ini pendapatan, jelas sekali bahwa seseorang yang mempunyai pendapatan yang tinggi, akan cenderung mempunyai konsumsi yang tinggi pula sampai batas tertentu. Karena itu disini konsumsi diperlakukan sebagai *proxy* pendapatan. Orang yang mempunyai konsumsi yang rendah dapat digolongkan sebagai miskin, sedangkan yang konsumsinya lebih tinggi sebagai tidak miskin.

Kemiskinan menurut Pihatminingtyas, 2015 adalah: ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada): modal yang produktif atau assets (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan dan lain-lain), organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama (partai politik, sindikat, koperasi dan lain-lain),

network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain, pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan orang.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa kemiskinan itu tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek material saja, tetapi juga menyangkut aspek-aspek non material. Berdasarkan hasil penelitian Prihatmingtyas, 2017 menjelaskan beberapa definisi kemiskinan sebagai berikut:

1. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang, ditambah dengan keuntungan non material, yang diterima seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Kemiskinan didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki keterbatasan seperti tanah, rumah peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain.
3. Kemiskinan non material meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga dan kehidupan yang layak.

Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan menggelandang dan tempat tinggal

yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta dalam kehidupan, sosial dan budaya.

2. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan/ketidakmampuan (*powerlessness*) dalam hal: 1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (*basic need depricator*) ; 2) melakukan kegiatan usaha produktif (*unproduktiveness*) ; 3) menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi (*inaccessibility*) ; 4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (*vulnerability*) ; 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*). Ketidakberdayaan/ketidakmampuan tersebut, menumbuhkan perilaku miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan, untuk berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

Seseorang dikatakan miskin secara *absolute* apabila pendapatannya lebih rendah dari pada garis kemiskinan *absolute* yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan *absolute* tersebut. Dengan demikian tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dengan tidak miskin atau sering disebut garis kemiskinan.

Sementara itu kemiskinan relative, adalah suatu perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan kata lain walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumah tangga tersebut masih berada dalam keadaan miskin.

Masalah kemiskinan memang bukan hanya masalah kekurangan dari sudut ekonomi saja, tetapi juga akan melibatkan adanya kekurangan dalam ukuran kebudayaan atau kejiwaan (psikologis). Kondisi keluarga miskin sebagai lingkungan sosial, kurang mendukung bagi timbulnya watak atau sifat-sifat yang dapat mendobrak kemiskinan. Ginanjar Kartasmita (1996), menjelaskan profil keberadaan rumah tangga miskin sebagai berikut:

Pertama, rumah tangga miskin menanggung beban yang lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak miskin.

Kedua, apabila ditinjau dari segi pendidikan sebanyak 68,4% kepala rumah tangga miskin di pedesaan tidak tamat SD dan 28,8% dari kepala rumah tangga miskin hanya berpendidikan SD. Kecenderungan yang sama dijumpai pada rumah tangga miskin di perkotaan, sekitar 54,4% rumah tangga miskin di perkotaan dipimpin oleh kepala rumah tangga yang tidak tamat SD. Jadi secara keseluruhan lebih 94% rumah tangga miskin mempunyai kepala rumah tangga yang tidak tamat SD. Ini tentu saja menjadi masalah bagi rumah tangga miskin.

Ketiga, adanya persebaran yang tidak sama antar penduduk miskin dan wilayah miskin. Penduduk miskin sebagian besar berada di pulau Jawa, yaitu sekitar 57,3% dari total penduduk miskin tersebut, sementara sisanya ada di luar Jawa. Sedangkan sebanyak 26,7% dari jumlah desa miskin di Indonesia terdapat di pulau Jawa. Sementara 34,9% ada di Sumatra dan sisanya di pulau-pulau lain di luar kedua pulau tersebut.

Keempat, selanjutnya kalau ditinjau dari sumber penghasilannya, apabila dibedakan menurut desa-kota, maka sekitar 79,5% rumah tangga miskin di pedesaan mengandalkan pada sumber penghasilan sektor pertanian. Ini konsisten dengan corak rumah tangga pedesaan, yang sebagian besar adalah rumah tangga petani. Sementara itu lebih dari 74% rumah tangga miskin di perkotaan, memperoleh penghasilan utama dari kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, dan hanya 25,6% rumah tangga miskin yang mengandalkan sektor pertanian saja. Kegiatan ekonomi perkotaan yang telah beragam memberikan sumber penghasilan yang beragam pula kepada rumah tangga miskin perkotaan.

Kelima, dilihat dari status pekerjaannya, sekitar 72,4% kepala rumah tangga miskin di daerah pedesaan berusaha sendiri, 20,1% bekerja buruh atau karyawan dan 7,3% sebagai pekerja keluarga. Sementara itu sekitar 49,4% kepala rumah tangga miskin di kota berusaha sendiri, 39,8% berstatus sebagai buruh atau karyawan dan sekitar 10% pekerja keluarga.

Keenam, dari sudut waktu bekerja bisa dikatakan bahwa lebih dari 70% rumah tangga miskin mencurahkan waktu kerjanya lebih dari 30 jam dalam seminggu untuk mendapatkan imbalan, dan 8,7% rumah

tangga miskin yang mencurahkan waktu kerjanya kurang dari 15 jam dalam seminggu. Dengan demikian maka terdapat sejumlah perbedaan dari berbagai sudut pada rumah tangga miskin.

Penyebab kemiskinan menjadi dua antar lain:

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor yang berada di luar jangkauan individu. Faktor ini secara kongkrit lebih bersifat hambatan kelembagaan atau struktur yang memang bisa menghambat seseorang untuk meraih kesempatan-kesempatannya. Adanya kemiskinan jenis ini bukan karena seseorang itu malas atau tidak mampu bekerja. Karena itu kemiskinan jenis ini disebut juga dengan kemiskinan struktural.
2. Kemiskinan yang disebabkan faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang atau lingkungannya. Kemiskinan jenis ini terjadi akibat dari nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut sekelompok masyarakat. Jadi tidak bermula dari struktur sosial tetapi berasal dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri.

Pendapatan yang rendah mencerminkan pula dalam standar kehidupan rakyat yang rendah, di negara seperti ini makanan merupakan jenis konsumsi utama dan sekitar 75% dari pendapatan dibelanjakan untuk makanan, dibandingkan hanya 20% di negara maju. Tiga perempat penduduk bumi yang berjumlah enam milyar tergolong orang yang kurang beruntung. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan bahan makanan yang cukup, kesehatan mereka buruk, mereka tidak bisa membaca dan menulis, mereka tidak mempunyai pekerjaan, masa depan

mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik suram atau tidak menentu.

Menurut BAPPENAS (2014), kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan menurut Bank Dunia (2014) adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

1. Rumah tangga miskin berdasarkan BPS, sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Rumah-Tangga Miskin

No	Variabel	Kriteria Rumah Tangga Miskin
1	Luas lantai bangunan tempat tinggal	Kurang dari 8 m ² per orang
2	Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Tanah/batu/kayu murahan
3	Jenis dinding tempat tinggal	Bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4	Fasilitas tempat buang air besar	Tidak mempunyai/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5	Sumber penerangan rumah tangga	Bukan listrik
6	Sumber air minum	Sumur/mata air tidak terlindung/sunga/ air hujan
7	Bahan bakar untuk memasak sehari-hari	Kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/susu/ayam per minggu	Tidak pernah mengkonsumsi/hanya satu kali dalam seminggu
9	Pembelian pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun	Tidak pernah membeli/hanya membeli 1 stel dalam setahun
10	Makanan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga	Hanya satu kali makan/dua kali makan dalam sehari
11	Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/poliklinik	Tidak mampu membayar untuk berobat

12	Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga	Petani dengan luas lahan 0,5 ha/buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan
13	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga	Tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14	Pemilikan aset tabungan	Tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
<p>Catatan:</p> <p>Rumah tangga yang layak mendapat SLT adalah rumah tangga yang memenuhi 9 atau lebih dari 14 ciri rumah tangga miskin.</p>		

Sumber: <http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/>

2. Kriteria Kemiskinan

1. Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya.
2. Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari.
3. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/bersekolah, maupun bepergian.
4. Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah.
5. Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.

Penduduk miskin erat hubungannya dengan wilayah miskin. Wilayah dengan potensi daerah yang tertinggal, besar kemungkinan menyebabkan penduduknya miskin. Oleh karena itu pendekatan pemecahan kemiskinan dapat pula dilakukan terhadap pengembangan wilayah atau desa yang bersangkutan.

Persoalan kemiskinan merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dibahas. Dari perspektif sosiologi, meminjam analisis fungsional Robert K. Merton, kita dapat menunjukkan kemiskinan itu bersifat fungsional. Oleh karena itu, kemiskinan perlu dipertahankan, demi kelestarian sistem yang ada, paling tidak ada enam fungsi orang miskin atau fungsi kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan dapat menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan kotor, tidak terhormat, berat, berbahaya, tetapi dibayar murah. Orang miskin diperlukan untuk membersihkan saluran pembuangan, membuang sampah, menaiki gedung yang tinggi, bekerja di pertambangan yang tanahnya mudah runtuh, memelihara binatang milik orang-orang kaya, dan lain-lain.
2. Kemiskinan dapat menambah atau memperpanjang nilai guna barang dan jasa. Barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai dapat dijual (atau diinfakkan) kepada orang-orang miskin, begitu pula barang-barang apkriran.
3. Kemiskinan dapat mensubsidi berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan orang-orang kaya.
4. Kemiskinan dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya kemiskinan, maka lahirlah berbagai lapangan pekerjaan baru, seperti tukang kredit (barang dan uang), aktivis-aktivis LSM (yang belum

memiliki pekerjaan tetap) yang menyalurkan dana dari bantuan badan-badan internasional untuk masyarakat miskin, berbagai kegiatan yang dikelola oleh Badan Kesejahteraan Sosial, dan belakangan ini program yang paling laku dijual adalah program yang terkait dengan bantuan terhadap masyarakat miskin.

5. Kemiskinan dapat memperteguh status sosial orang-orang kaya.
6. Orang miskin juga bermanfaat untuk dijadikan tumbal pembangunan.

3. Indikator, Proses dan Garis Kemiskinan

Kontribusi teoritik yang lebih komprehensif mengenai indikator dan proses terjadinya kemiskinan dibuat oleh Jazairy, et. al., dalam Mohtar Mas'ood (1994). Menurutnya, indikator mengenai siapa yang miskin dapat dilihat dari:

1. Deprivasi materiil, yang diukur dari kurangnya pemenuhan kebutuhan akan: pangan, sandang, kesehatan, papan dan kebutuhan konsumsi dasar lainnya.
2. Isolasi, yang dapat dilihat letak geografis terpencil, hampir tanpa sarana transportasi dan komunikasi.
3. Alienasi, yaitu perasaan tidak punya identitas dan tidak punya kontrol atas diri sendiri, karena tidak memiliki kecakapan yang dapat dijual.
4. Ketergantungan. Si miskin tidak memiliki posisi tawar dalam menetapkan upah atau harga hasil taninya.
5. Ketidakmampuan membuat keputusan sendiri dan tiadanya kebebasan memilih dalam produksi, konsumsi, dan kesempatan kerja, serta kurangnya perwakilan sosio-politik mereka, tercermin

dalam tidak adanya fleksibilitas dan berkurangnya kesempatan bagi si miskin di desa

Secara umum penyebab kemiskinan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, antara lain:

1. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan maupun lembaga yang ada di masyarakat sehingga dapat menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat;
2. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berhubungan dengan adanya nilai-nilai yang tidak produktif pada masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk; dan
3. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang ditunjukkan oleh kondisi alam maupun geografis yang tidak mendukung, misalnya daerah tandus, kering, maupun keterisolasian daerah.

Bangsa Indonesia, yang secara kultural potensial untuk miskin karena sejak dulu dimanja oleh kesuburan dan kekayaan alamnya, memiliki mental instan, sehingga tidak memiliki kesabaran untuk menjalani proses, dan hanya memiliki kesabaran untuk menanggung kemiskinan. Sifat “nerimo” tampaknya menjadi sesuatu yang negatif dan kehilangan povernya yang positif, karena salah arah: salah menggunakan potensi sabar, bukan bersabar untuk berproses tapi bersabar untuk menunggu diberi.

Budaya kemiskinan, yang didefinisikan sebagai suatu cara hidup dan cara pandang, yang lemah dan gampang puas, dan dialami serta dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang miskin, jarang sekali

mendapat tempat dalam suatu kursus perencanaan dan program penanggulangan kemiskinan. Dimensi ini senantiasa dipandang sebagai mengada-ada dan produk analisis yang bias yang sengaja dilantunkan oleh para ilmuwan Barat untuk sekadar menjelek-jelekkan orang Indonesia.

Salah satu dimensi penting yang melestarikan budaya miskin adalah kenyataan bahwa di setiap *setting* kebudayaan lokal di Indonesia terbangun suatu organisasi sosial dengan kepemimpinan lokal yang khas. Mereka membentuk strata dimana strata atas senantiasa menguasai berbagai bentuk sumberdaya yang tersedia. Secara sosiologis, disebagian besar wilayah Indonesia, masyarakat terbagi dalam sekat-sekat vertikal, antara para elite lokal feodal yang berada di lapisan atas dan eksploitatif, serta kaum marginal-miskin di lapisan bawah.

Rakyat miskin tidak siap menghadapi tuntutan baru seperti kecepatan menangkap peluang, menghargai waktu, menghargai uang, produktif, dan sejenisnya. Mereka menjadi bertambah sulit untuk lepas dari kungkungan. Ini diperburuk oleh kecenderungan umum yang terjadi dalam setiap komunitas di Indonesia, yaitu hancurnya nilai-nilai dan orientasi budaya yang menopang modal sosial. Padahal, di zaman dulu, modal sosial inilah yang masih mampu menyelamatkan kaum miskin dari keterpurukan. Ini tampaknya menjadi inti persoalan yang melingkari kemiskinan masyarakat di Indonesia. Dengan situasi seperti ini, sebesar apapun pertumbuhan ekonomi makro yang dapat dicapai, dan sebesar apapun dana kredit yang mengalir kepedesaan, tidak akan banyak manfaatnya bagi orang miskin.

4. Kaum Perempuan dan Kemiskinan

Mayoritas penduduk miskin di dunia adalah kaum perempuan dan mereka lah beserta anak-anak yang paling menderita kemiskinan serta kekurangan gizi, dan mereka pula yang paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan berbagai bentuk jasa sosial yang lainnya. Menurut Prihatminingtyas, 2010 banyaknya wanita yang menjadi kepala rumah tangga, rendahnya kesempatan dan kapasitas mereka dalam memiliki pendapatan sendiri, serta terbatasnya kontrol mereka terhadap penghasilan suami, merupakan sebab-sebab pokok atas terjadinya fenomena yang amat memprihatinkan tersebut. Selain itu, akses kaum wanita ternyata juga sangat terbatas untuk memperoleh kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan disektor formal, berbagai tunjangan sosial, dan program-program penciptaan lapangan kerja yang dilancarkan oleh pemerintah. Kenyataan ini turut mempersempit sumber-sumber keuangan bagi mereka, sehingga posisi mereka secara finansial kurang stabil, bila dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Pada umumnya para perempuan yang ada di dalam rumah tangga yang dikepalai oleh seorang perempuan mempunyai tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah. Disamping beban berat yang harus ditanggung para wanita tersebut, karena menjadi orang tua tunggal, ukuran keluarga yang semakin besar akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat pembelanjaan pangan perkapita.

Sebagian dari penyebab perbedaan pendapatan antara keluarga atau rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan perempuan itu bersumber dari adanya perbedaan pendapatan yang sangat besar antara laki-laki dan perempuan. Selain upah buruh wanita biasanya lebih rendah (meskipun

porsi atau beban kerjanya sama) mereka juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berupah tinggi. Di daerah perkotaan sekalipun, kaum perempuan lebih sulit mendapatkan pekerjaan-pekerjaan formal di perusahaan swasta maupun di lembaga perusahaan. Akibatnya, mereka pun terpaksa terkungkung dalam bidang-bidang kerja yang berpenghasilan atau yang produktivitas rendah, atau bahkan yang ilegal. Di pedesaan, situasinya sama sekali tidak lebih baik, kaum perempuan disitu juga sulit mendapatkan pekerjaan yang dapat memberinya sejumlah penghasilan secara tetap dan selalu menjadi pokok bahasan dalam peraturan yang bertujuan untuk menyelaraskan pendapatan potensial. Ketentuan yang ada acapkali justru menghalangi kaum perempuan untuk memiliki faktor-faktor produksi atau terlibat dalam suatu kontrak finansial bila tidak disertai tanda tangan suami, dan biasanya wanita tidak dapat memperoleh sumber daya yang disediakan pemerintah seperti: kredit atau pelatihan. Hal-hal semacam ini tentu saja turut memperlebar kesenjangan pendapatan antara kaum laki-laki dan perempuan.

Kondisi pendapatan rumah tangga itu saja belum cukup untuk menjelaskan, kesengsaraan relatif yang diderita oleh perempuan dan anak-anak, karena keluarga yang dikepalai oleh perempuan, umumnya ditemui pada segmen masyarakat termiskin, dengan sedikit bahkan sama sekali tanpa pelayanan sosial yang disediakan oleh pihak pemerintah, seperti: fasilitas air bersih, sanitasi dan pelayanan bidang kesehatan, maka anggota-anggota keluarga itupun lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu sedikit saja diantara mereka yang bisa meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, karena sejak dini sudah harus turut bekerja atau

mencari tambahan penghasilan, dalam upaya menegakkan tiang ekonomi keluarga.

Walaupun sesungguhnya status ekonomi dari kaum perempuan dikalangan miskin tersebut, merupakan sebuah indikator yang lebih baik, karena lebih mampu mencerminkan sejauhmana tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya, yang ada pada diri mereka dan anak-anak. Berbagai penelitian tentang alokasi sumber daya dalam setiap rumah tangga, menunjukkan secara jelas bahwa dibanyak kawasan di dunia, kecukupan gizi, pelayanan kesehatan, taraf pendidikan dan warisan yang diterima oleh perempuan lebih rendah daripada yang dinikmati oleh kaum laki-laki.

Ketimpangan distribusi pendapatan dalam rumah tangga banyak dipengaruhi oleh status ekonomi kaum wanita. Prihatminingtyas, 2010 menyatakan: berbagai penelitian wanita di suatu bangsa meningkat atau relatif lebih tinggi, maka diskriminasi yang berlangsung terhadap anak-anak perempuan akan lebih rendah, dan kaum wanita atau ibu-ibu merekapun lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri dan juga kebutuhan anak-anak mereka. Jika pendapatan dari keluarga itu sangat rendah, maka boleh dikatakan seluruh hasil kerja atau pendapatan sang ibu, akan dihabiskan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kecukupan gizi yang diperlukan. Akan tetapi apabila yang bertambah adalah penghasilan kepala rumah tangga, maka bagian penghasilan keluarga yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan gizi keluarga tidak akan bertambah terlalu banyak. Oleh karena itu, program perbaikan gizi akan lebih berhasil jika langsung diarahkan kepada kaum wanita, bukan kepada kaum laki-laki.

Dalam banyak budaya, partisipasi kaum perempuan secara signifikan dalam penghasilan rumah tangga kurang bisa diterima secara sosial, karenanya hasil karya mereka tetap tidak tampak atau kurang diperhatikan. Semua ini merupakan faktor penyebab terus bertahannya status ekonomi kaum perempuan yang rendah, yang selanjutnya semakin membatasi kontrol mereka terhadap tingkat penghasilan atau sumber daya ekonomi keluarga. Kebijakan pembangunan yang diterapkan, ternyata seringkali turut memperlebar jurang kesenjangan produktivitas antara laki-laki dan perempuan, yang dengan sendirinya akan memperburuk ketimpangan pendapatan antar keduanya, sekaligus memperparah status ekonomi kaum perempuan didalam rumah tangganya. Mengingat program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini lebih tertuju kepada kaum laki-laki saja, maka berbagai bentuk ketimpangan yang diderita oleh kaum perempuan cenderung semakin parah.

Konsekuensi atas rendahnya status ekonomi kaum perempuan, baik secara relatif maupun absolut, mengandung berbagai implikasi etis dan ekonomi berjangka panjang. Setiap proses pertumbuhan ekonomi yang gagal memperbaiki kondisi kesejahteraan mereka, yang paling merana adalah perempuan dan anak-anak, serta berarti pula telah gagal mencapai salah satu dari tujuan utama pembangunan. Dalam jangka panjang, rendahnya status ekonomi kaum perempuan tersebut pada gilirannya akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya tidaklah mengherankan, jika kita ingat bahwa kondisi kesejahteraan dan tingkat pendidikan anak-anak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kondisi kesejahteraan sang ibu, dan bukan sang

ayah. Dengan demikian, investasi sumber daya manusia hanya akan berhasil diteruskan ke generasi mendatang jika menyertakan upaya perbaikan status dan kesejahteraan kaum perempuan kedalam proses pertumbuhan. Karena sumber daya manusia itu sendiri mungkin merupakan syarat terpenting bagi terciptanya proses pertumbuhan yang berkesinambungan, maka pendidikan dan upaya peningkatan kesejahteraan serta status ekonomi kaum perempuan, jelas merupakan suatu faktor yang sangat penting demi tercapainya berbagai tujuan pembangunan jangka panjang.

BAB 11

BISNIS LINGKUNGAN HIDUP DAN ETIKA

INDUSTRI 4.0

Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan kompetitif menurut para pembisnis untuk meningkatkan daya saing. Di Indonesia, masalah tanggung jawab sosial bisnis menjadi isu yang belum terselesaikan dengan baik. Namun kebanyakan dari mereka masih belum mengerti bagaimana cara bersaing yang diajarkan dalam Islam. Banyak instansi atau orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat merugikan pihak lain. Adanya etika dalam bisnis dapat mengendalikan penyimpangan atau mencegah penyimpangan itu terjadi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut UU no 40 tahun 2007, tentang perseroan terbatas telah dinyatakan bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari pada tugas perseroan, oleh karena itu perseroan harus menyediakan dana. Artinya komponen tanggung jawab sosial bukan lagi didasarkan kepada skema perusahaan punya dana, akan tetapi di awal perusahaan telah diharuskan mencantumkan dana tanggung jawab sosial. Konsep ini menjustifikasi anggaran di tingkat manajemen puncak yang belum tentu mendapat pengesahan.

Indonesia saat ini dilanda kriminalitas kontemporer yang mengancam Lingkungan Hidup, sumber energi dan pola kejahatan dibidang ekonomi seperti kejahatan Bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang produksi kualitas rendah dan berbagai pola kejahatan korporasi lainnya. Modus yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dulu tidak dikenal dan tidak pernah

dipikirkan oleh para pelaku kejahatan, namun saat ini menjadi suatu trend modus kejahatan yang berkaitan dengan hukum pidana.

1. Etika Melakukan Perbuatan Baik

Suatu tindakan itu dapat dikatakan baik bukan dilihat dari nilai dan perilaku atau tujuan dari tindakan tersebut, melainkan berdasarkan pada kewajiban yang bertindak kepada orang lain seperti keinginan diri sendiri selalu berlaku baik pada diri sendiri maupun orang lain. Teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar bagi baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Sebuah tindakan yang dilakukan tanpa melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban.

a. Tanggung Jawab Sosial Di Bidang organisasi

1. Kode etika merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu dapat berperilaku secara etis.
2. Kontrol eris diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnis.
3. Perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi.
4. Kode etik sebagai upaya untuk memahami moral dan nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya.

5. Kode etik merupakan sebuah pesan. Profesi yang keberadaan yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Seorang profesional harus memiliki keterampilan, pengetahuan, tidak cukup untuk menjadi profesional.

b. Etika Pribadi dan Etika Sosial

Untuk mengetahui etika pribadi dan etika sosial antara lain sebagai berikut:

1. Etika pribadi, misalnya seorang yang berhasil dibidang usaha disibukkan dengan usahanya sehingga lupa akan diri pribadinya sehingga hamba Tuhan. Ia mempergunakan untuk keperluan yang tidak dipuji dimata masyarakat.
2. Etika sosial, misalnya seorang pejabat pemerintahan dipercaya untuk mengelola uang milik negara Uang milik Negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata melakukan penggelapan uang Negara untuk kepentingan
3. Pribadinya, sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan uang yang dipakai kepada pemerintah. Perbuatan pejabat tersebut adalah perbuatan yang merusak etika atau korupsi.

Kualitas lingkungan adalah kebaikan publik, dimana setiap orang meningkati tanpa peduli siapa yang membayar. Jika suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan tentunya membawa dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi udara, tanah dan air. Pencegahan polusi udara, melalui proses produksi.

1. Proses produksi dengan mendesain pEralatan produksi dan produknya, melalukan daur ulang plastik dan membatasi pemakaian material yang akan menjadi sampah plastik.

2. Mencegah polusi, dengan cara menyimpan dan mengirim barang sisa beracun kelokasi pembuangan yang jauh dari pemukiman penduduk.
3. Pencemaran air mengacu pada perubahan fisik, biologi, kimia, dan kondisi badan air yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Hasil limbah industri yang sudah tidak dapat ditampung lagi oleh ekosistem alam, salah satu penyebab pencemaran air, masalah kesehatan lingkungan yang serius dan merupakan polusi yang berasal dari bahan kimia dan proses limbah industri.

2. Prinsip Etika dalam Lingkungan

1. Sikap menjaga ekosistem alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta.
2. Tanggung jawab bukan bersifat individu melainkan kolektif yang menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta beserta isinya.
3. Prinsip solidaritas yang membangkitkan rasa kebersamaan, dengan menjaga ekosistem alam dan makhluk hidup, sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan.
4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam semesta, yang tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi.
5. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi.
6. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan ikut menikmati manfaat sumber daya alam secara lestari

7. Menjaga ekosistem agar tetap lestari dan tidak rusak sehingga sumberdaya alam bisa dinikmati dimasa yang akan datang.
8. Prinsip integritas moral menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan prilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang terkait dengan sumber daya alam.

3. Krisis lingkungan hidup.

Masalah disekitar hidup kita perlu kita sadari bagaimana industri mengakibatkan munculnya kota dengan polusi udara yang buruk bagi kesehatan. Tempat yang ada disekitar pabrik diasosiasikan dengan suasana asap udara yang tidak sehat. Keadaan didaErah industri pada waktu dulu masih cukup bersih khususnya di daErah pertanian dan peternakan. Saat ini di daerah pertanian dan peternakan yang dekat dengan pemukiman penduduk, akan tercium bau pupuk kandang yang bisa menyengat hidung tetapi faktor kurang bagus itu hanya bersifat sementara dan hilang dalam suatu suasana menyeluruh yang positif. Lingkungan hidup dalam bisnis modern yakni bahwa sumber daya alam itu tak terbatas. Umber daya alam ditandai dengan kelangkaan. Jika peminat jumlah besar air,udara yang ada didalam akan menjadi barang langka dan karena tidak dapat dipergunakan lagi secara gratis. Faktor lingkungan hidup merupakan urusan ekonomi karena memanfaatkan barang dan jasa yang langka dengan efisien sehingga dinikmati oleh semua peminat.

4. Hubungan Manusia dengan Alam

Lingkungan hidup menimbulkan suatu cabang filsafat baru yang berkembang dengan cepat yaitu filsafat lingkungan hidup. Ciri khas sikap manusia modern adalah usaha untuk menguasai dan menaklukkan alam. Alam dipandang sebagai binatang buas yang perlu dijinakan oleh manusia. Tujuan dibantu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan manusia modern dengan alam adalah antroposentris karena menempatkan manusia pada pusat.

5. Mencari dasar etika untuk tanggung jawab terhadap lingkungan

Hasil analisa sampai sekarang adalah bahwa manusia mempunyai tanggung jawab moral terhadap lingkungan walaupun manusia termasuk alam yang dapat dianggap sebagai alam namun yang sanggup melampaui status alam dengan memikul tanggung jawab. Isi tanggung jawab dalam konteks ekonomi dan bisnis adalah melestarikan lingkungan hidup atau memanfaatkan sumber daya alam sedemikian rupa hingga kualitas lingkungannya tetap ada manfaatnya bagi manusia.

6. Hakikat Kewajiban

Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain Kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban menurut prof. Notonagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya oleh pihak tertentu, tidak dapat digali oleh pihak lain, sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan antara lain:

1. Kewajiban Karyawan dan Perusahaan

2. Kewajiban ketaatan, karyawan tidak boleh mematuhi perintah yang menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral seperti membunuh musuhnya.
3. Kewajiban Konfidensialitas ,kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat sangat rahasia.Sangatlah tidak etis apabila seorang karyawan pindah ke perusahaan baru dengan membawa rahasia perusahaanya yang lama agar ia mendapat gaji yang lebih besar.
4. Kewajiban loyalitas ,karyawan yang sering berpindah-pindah pekerjaan dengan harapan memperoleh gaji yang lebih tinggi dipandang tidak etis karena dia hanya bereorientasi pada materi belaka.
5. Kewajiban perusahaan terhadap karyawan,perusahaan tidak melakuakan diskriminasi ,perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan ,perusahaan memberikan gaji secara adil, perusahaan tidak boleh menghentikan karyawan dengan semena-mena.

7. Pengertian tentang tanggung jawab sosial perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan disekitar dimana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Beberapa ranah etika dan tanggung jawab sosial yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan secara etis dan bertanggung jawab agar mampu diterima di area bisnis nasional maupun multinasional harus patuh pada beberapa hal berikut ini:

1. Produsen memberikan produk yang aman dan harga wajar, serta kemudian konsumen mendapatkan informasi akurat terhadap produk yang dikonsumsi.
2. Perusahaan memiliki kewajiban dalam menyediakan pengambilan investasi dan investor yang menarik dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan.
3. Perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawan mulai dari perencanaan, perkrutan, penggajian, orientasi, penempatan keselamatan kerja serta kesejahteraan.

8. Ijin Usaha

Perusahaan selalu berupaya agar berusaha menaati peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah. Dengan mengajukan ijin usaha secara sukarela maka akan dapat menyakinkan pemerintah dan masyarakat luas bahwa usahanya sangat serius dalam memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatan, diskriminasi atau lingkungan hidup maka dengan demikian dapat menghindari intervensi. Perusahaan yang membuka usaha diluar negara asalnya dapat memastikan bahwa mereka diterima dengan baik selaku warga perusahaan yang baik dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dan akibat terhadap lingkungan hidup, sehingga dengan demikian keuntungan yang menyolok dan gaji dewan direksinya yang sangat tinggi tidak dipersoalkan dilingkungan. Apabila perusahaan bersaing dalam lingkungan internasional, mereka harus tanggap akan perbedaan kebudayaan, Perusahaan dan beberapa Negara tidak semuanya mempunyai pandangan bahwa memberikan imbalan kepada pelanggan besar atau pemasok besar sebagai tidak etis.

BAB 12

RESOLUSI MODEL BISNIS PADA ERA INDUSTRI 4.0

1. Fenomena Era Industri 4.0

Seringkali kita dibuat penasaran ketika perusahaan memberikan layanan gratis atau bahkan memberikan jasa dengan menawarkan subsidi sehingga jasa yang diberikan jauh lebih murah dari pada yang disediakan oleh pasar. Hal tersebut dilakukan perusahaan yang merajai pada Era Revolusi Industri 4.0 sebagaimana dilakukan oleh industri yang difasilitasi oleh teknologi modern. Perusahaan berhasil merebut hati para konsumen sehingga tanpa sadar masyarakat menggunakan jasa yang disediakan dan para pengguna telah menjadi komoditas yang dapat dijual kembali kepada perusahaan komersial. Lalu lintas pengguna layanan yang telah melalui proses produksi menjadi komoditas untuk menghasilkan pendapatan secara tindakan langsung. Fenomena ini menarik untuk ditelusuri, terdapat empat karakter para pelaku bisnis Era Revolusi Industri 4.0

1. Perusahaan menawarkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat kebanyakan. Semakin banyak masyarakat yang dapat dibantu dengan layanan inovatifnya, maka perusahaan akan semakin berpeluang menjadi besar. Mesin pencari data yang ditawarkan oleh Google atau aplikasi penunjuk arah pada Google Maps yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas pada Era industri 4.0 dan masih banyak lagi solusi yang ditawarkan dan hErannya semua diberikan kepada masyarakat secara gratis. Wabah virus ini juga tampak ketika aplikasi Gojek dan Grab

menawarkan solusi atas kemacetan di berbagai kota dengan biaya yang terjangkau oleh kalangan masyarakat. Tidak saja konsumen yang terbantu, begitu pula dengan pengemudi ojek yang pendapatannya naik secara signifikan bahkan membuka lapangan pekerjaan baru pemerintah menjadi terbantu, walaupun pasti ada trade off dari inovasi yang bersifat disruptif ini ketika perusahaan jasa transportasi meningkat.

2. Perusahaan pada Era Revolusi Industri 4.0 tidak pernah puas dengan hasil yang dicapainya sehingga berupaya secara terus-menerus melakukan inovasi, Sebaliknya perusahaan pada Era Revolusi Industri 4.0 ini secara rutin mengundang keramaian untuk menyalurkan inovasinya melalui kompetisi inovasi atau dengan menyediakan ruang kerja bersama untuk memantau perusahaan yang dapat dibesarkan sehingga bisnis perusahaan bisa terus berkembang. Inovasi teknologi memiliki model bisnis yang mampu menawarkan nilai tambah. Para pelaku bisnis juga membutuhkan pendanaan yang bentuknya berbeda dengan kredit perbankan. Perusahaan besar melengkapi bisnisnya dengan mendirikan perusahaan modal ventura.
3. Model monopolistik kapitalisme. model bisnis perusahaan Era revolusi industri 4.0 yang menganut paham ekonomi dipersepsikan dapat menjadi solusi kesenjangan ekonomi.

Perusahaan pada Era Revolusi Industri 4.0 cenderung menjadi yang paling unggul pada bisnisnya dan tidak ingin ada pesaingnya antara lain:

- a. Mesin pencari yang dikenal adalah Google dengan sabar dan telaten.
- b. Perusahaan media sosial adalah Facebook.
- c. Jasa transportasi adalah uber, ketika Amazon menguasai pasar di Amerika Serikat, Alibaba di Tiongkok, atau Rakuten di Jepang.

Perusahaan berupaya menjadi raksasa tunggal di bisnis yang dikelolanya telah menemukan model bisnis ideal, untuk penyempurnaan produk atau layanan yang ditawarkan hanya dilakukan untuk melakukan strategi bersaing.

4. Konsumen tidak hanya sebatas pengguna produk tetapi melihat konsumen dari multi dimensinya sebagai manusia sehingga konsumen akan memilih produk yang memuaskan keinginannya untuk berpartisipasi, berkreasi, komunitas, dan idealismenya (Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya).

Agar perusahaan menjadi inovatif Ada tiga hal yang dilakukan:

1. Mengombinasikan teknologi Sebagai contohnya, perusahaan mengombinasikan teknologi 3D printing dengan big data ataupun internet of things.
2. Perusahaan melakukan lompatan teknologi yang sangat cepat. Pada Era revolusi industri 4.0 teknologi sangat mudah menyebar sehingga dalam hitungan tahun bahkan bulan teknologi baru tadi telah menjadi usang. Hal ini tak pernah dibayangkan sebelumnya sebagaimana Era Revolusi Industri 1.0 ketika teknologi mesin uap dapat bertahan berpuluh-puluh tahun.

3. Perusahaan menawarkan solusi terhadap perusahaan global
Pada akhirnya perusahaan komersial perlu mengadaptasi karakter positif yang dimiliki perusahaan pengendali pada Era Revolusi Industri 4.0 Perusahaan komersial harus mampu menemukan permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait bidang yang dikelola sehingga inovasi yang dilakukan terus berkembang dengan pesat. Pada Era Revolusi Industri 4.0 perusahaan komersial yang mampu memberi tampak positif kepada kesejahteraan manusia akan menjadi besar dan semakin besar dampak positif yang diberikan maka akan semakin besar perusahaan tersebut.
5. Perubahan dunia kini tengah memasuki Era Revolusi Industri 4.0 dimana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masih sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Dengan panangan tersebut menyatakan generasi di Era Revolusi Industri 4.0 memegang komitmen peningkatan fleksibilitas di bidang manufaktur secara masal, dengan kualitas dan produktivitas yang lebih baik. perubahan pesat yang dialami masyarakat karena pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa banyak dampak pada kehidupan manusia, secara umum bersifat positif dan negatif.

2. Kompetensi SDM

Untuk merespons perubahan Era Revolusi Industri 4.0. Pemerintah telah bersiap dengan merancang prta jalan berjudul (*Making Indonesia*), sebagai strategi Indonesia memasuki Era digital saat ini, seta

menetapkan arah yang jelas bagi masa depan industri nasional. Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengelompokkan lima industri utama yang disiapkan untuk Era Revolusi Industri 4.0. Fokus implementasi Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia yaitu:

1. Industri makanan dan minuman.
2. Tekstil.
3. Otomotif.
4. Elektronik.
5. Kimia.

Presiden Indonesia ke 7 Joko Widodo mengungkapkan bahwa tantangan kita kedepan harus mampu menguasai bidang intelijen dan bio teknologi serta menguasai sesuatu yang bersifat pisikal. Di Era industri 4.0 akan mendiskrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan tinggi. Visualisasi mengembangkan literasi informasi dan keterampilan riset melalui pembelajaran STEAM melalui belajar berbasis kehidupan untuk menyiapkan guru yang siap menghadapi tantangan Era Revolusi Industri 4.0

3. Transaksi Online Shop

Di era industri 4.0 perkembangan teknologi begitu cepat masyarakat tidak asing lagi dengan internet, semua yang di inginkan bisa dicari lewat internet. *Menggunakan fasilitas Website, blog, dan media sosial secara simultan berpengaruh terhadap strategi pemasaran UMKM* binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di kecamatan Lowokwaru kota Malang. Online shop merupakan salah satu kemudahan gaya hidup

seluruh masyarakat yang bisa dicapai melalui internet. Online shop ini mampu menyediakan layanan jasa dan barang yang diinginkan secara cepat sesuai permintaan konsumen. Adanya media internet ini sangat memudahkan para pembeli dan juga penjual untuk melakukan transaksi. Penjualan bisa secara luas dan mudah di akses oleh warga dunia. Pada saat ini berdagang apapun bisa memanfaatkan media internet dan telekomunikasi dengan mudah untuk memasarkan dagangannya didalam ataupun diseluruh dunia.

Masyarakat bisa mengakses internet kapanpun dan dimana saja. Bisa dilakukan dirumah, kampus, jalan, dan dimanapun tempatnya. Perbedaan berjualan onlie dengan offline yaitu dari segi aksesnya. Berjualan offline, calon pembeli langsung datang kelokasi orang yang berjualan, tetapi dengan berjualan offline kita bisa membeli tanpa kelokasi orang yang berjualan atau mengunjungi website. Selanjutnya membeli dengan mengakses internet dimanapun mereka beradahnya dengan membuka website. Dalam melakukan transaksi juga lebih mudah melalui transfer.

Dari segi harga mulai yang rendah sampai harga yang tinggi, harga yang ditawarkan, selanjutnya banyak diskon yang rendah sampai diskon yang tinggi. Biasanya juga bebas ongkos kirim yang diberikan para konsumen agar konsumen nyaman serta ingin membeli dan membeli lagi.

4. Peranan Etika Bisnis Dalam Online Shop

Peranan etika bisnis online shop sangat penting karena etika mendorong untuk memajukan sebuah perusahaan. Tanpa ada etika dalam berbisnis tidak akan berkembang. Agar tetap bertahan seorang

pengusaha harus mempunyai etika dalam menjalankan bisnis. Adanya etika juga bisa untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Etika bisnis ini membentuk suatu kenyamanan tertentu terhadap para konsumen, saat berbelanja pada situs website. Online shop mempertimbangkan etika dalam tujuan bisnis, khususnya tujuan untuk memaksimalkan keuntungan karena banyak perusahaan atau online shop mengalami dilema moral. Namun usahanya berhasil dalam menyelesaikan dengan menggunakan moral sehingga tetap memperoleh keuntungan. Online shop yang dikenal mempunyai kultur yang bermoral tinggi adalah online shop yang berhasil melayani konsumennya.

5. Pengaruh Etika Bisnis Dalam Online Shop

Pengaruh etika bisnis dalam online shop ini begitu banyak karena seiring berkembangnya teknologi di zaman sekarang. Perdagangan semakin bisa dijangkau dimana saja, dengan adanya etika bisnis produsen bisa melihat bagaimana konsumen ini dalam membeli produk atau jasa dengan jujur atau berbohong. Produsen juga harus pintar dalam melihat konsumen. Bagaimana dalam membeli, apakah bisa diajak kerjasama dalam hal transaksi seperti halnya konsumen sudah membayar barang yang sudah dipilih, selanjutnya sudah mentransfer sesuai harga barang yang dibeli. Tetapi pihak produsen tidak mengirim barang yang sudah dipilih dan dibayar pihak konsumen.

Etika bisnis atau moral memiliki karakteristik yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Berhubungan dengan hal yang memberikan dampak yang besar bagi kehidupan dan kesejahteraan personal atau kelompok. Online shop juga banyak keuntungannya seperti orang yang berjualan tidak perlu memiliki toko terlebih dahulu,

melakukan bisnis melalui online shop tinggal membuka website dan mendaftarkan nama toko yang diinginkan, banyak pilihan dari segi pembayaran juga mudah dan praktis.

BAB 13

ETIKA BISNIS DAN PERMASALAHANNYA

1. Bidang Ekonomi Dan Bisnis Amanah

Manusia sebagai makhluk sosial diamati oleh Allah untuk kelangsungan hidup, agar sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Amanah yang dalam pengertian hidup dipahami sebagai kepercayaan, ternyata memiliki makna yang dalam dan merupakan salah satu kunci dalam konsep syari'ah, khususnya dalam kaitannya dengan aspek muamalah yaitu aspek yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis amanah merupakan niat atau itikad yang perlu diperhatikan, baik dalam mengelola sumber alam dan manusia secara makro, maupun suatu perusahaan. Seorang Manejer pada dasarnya adalah pemegang amanah. Manejer merupakan pengelola faktor produksi yang harus dijalankan. Setiap kehidupan manusia adalah pengalaman, oleh karena itu manusia memiliki kemampuan pengetahuan, kemampuan keterampilan dan pengetahuan sikap (Prihatmingtyas, 2015). Perkembangan bisnis atau perusahaan, baik sebagai akibat maupun sebagai perkembangan politik, ekonomi sosial maupun teknologi serta aspek lingkungan disekitarnya. Agar suatu perusahaan atau bisnis dapat mencapai tujuan secara kontinyu dengan dukungan masyarakat luas, maka manajemen perusahaan, konsumen dan stakeholder dengan cara yang berdasarkan nilai dan norma etika bisnis. Tujuan etika bisnis yaitu, agar semua orang terlibat dalam bisnis itu sendiri dan agar belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik

secara etis maupun ekonomis. Tuntutan terhadap etika bisnis dan implementasi Good Corporate Governance, telah menjadi semacam paradigma baru, dengan menuntut antara lain: tuntutan adanya transparansi dalam kepengurusan dan pemerintahan yang baik disegala sektor, Tuntutan tanggung jawab kepengurusan disegala bidang, tuntutan kewajaran dalam menjalankan aktivitas usaha dan tuntutan profesionalisme.

Kewajiban karyawan dan perusahaan memiliki keterkaitan, baik kewajiban karyawan dengan perusahaan maupun kewajiban perusahaan dengan karyawan. Karyawan wajib menaati aturan di dalam industri, tentunya tidak semua perintah harus dijalankan tetapi perintah yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila seorang menjadi karyawan harus bisa menyimpan rahasia perusahaan dari perusahaan lain. Karyawan juga berkewajiban untuk dapat membedakan mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan perusahaan, maksudnya seorang karyawan harus bersikap profesional bila sedang berada ditempat kerja, tidak membawa urusan pribadi ke tempat kerja. Sebaliknya perusahaan tidak boleh bersikap diskriminasi terhadap karyawan misalnya dengan bersikap terbuka dalam merekrut karyawan, tidak membedakan ras, suku, agama, dsb.

Tujuan mendirikan perusahaan bukan hanya untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, tetapi juga untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Kesehatan dan kesejahteraan para karyawan perlu diperhatikan, jika karyawan sehat dan sejahtera akan memberikan hasil produk yang maksimal. Dengan meningkatnya keuntungan maka perusahaan wajib memberi gaji yang adil, adil maksudnya sesuai dengan

kebutuhan karyawan. Perusahaan tidak boleh memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan karyawan. Ke dua belah pihak mengikuti prosedur yang berlaku dan harus ada keterbukaan antara karyawan perusahaan sehingga tidak ada salah paham antara ke dua belah pihak.

2. Bisnis Online Dan Bisnis Konvensional

Kemajuan dibidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun, untuk menunjang aktivitasnya bisnisnya, bahkan sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus mendapatkan informasi yang tepat dan relevan.

Peggunaan internet dalam bisnis berubah dalam dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis, seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Pemasaran di internet sama dengan direct marketing, dimana konsumen berhubungan langsung dengan penjual, walaupun penjual berada di luar negeri.

Namun sebelum maraknya bisnis online, terdapat bisnis konvensional yang merupakan dasar dalam berbisnis, dalam beberapa hal terdapat perbedaan antara bisnis online dan bisnis konvensional, diantaranya. Bisnis online, adalah kegiatan atau transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet untuk mendapatkan keuntungan.

1.1 kelebihan dalam berbisnis online:

1. lingkup pemasarannya luas,tidak terbatas pada daerah sekitar.

2. Dapat dipasarkan didalam dan sampai keluar negeri.
3. Tidak memerlukan stok barang yang banyak, berlebih dapat dilakukan dimanapun asalkan memiliki akses internet yang baik.
4. Barang yang dipesan akan dibungkus rapi serta langsung diantarkan ke tempat tujuan.
5. Tidak memerlukan modal yang besar.

1.2 Kekurangan dalam berbisnis online:

1. Karena produk tidak dapat dilihat secara langsung, maka hasil pesanan menjadi kurang meyakinkan.
 2. Banyak situs bisnis online yang menipu konsumen sehingga konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih situs belanja online.
 3. Dalam mengantarkan barang pesanan, terkadang beberapa situs bisnis online mengantar barang tidak tepat pada waktunya.
- a. Bisnis konvensional bisnis, konvensional atau yang lebih sering dikenal dengan bisnis offline adalah kegiatan atau transaksi jual-beli dilakukan secara langsung, bertatap muka antara penjual dengan pembeli

2.1 kelebihan dalam bisnis konvensional

1. Pembeli langsung dapat melihat produk yang akan dibeli sehingga pembeli tidak merasa ragu akan produk yang akan dibeli.
2. Umumnya bisnis konvensional memiliki tempat atau kios sendiri sehingga pembeli dapat mengunjungi kios dan dapat secara langsung bertemu dengan penjual.

3. Memiliki banyak stok sehingga apabila ketika pembeli ingin membeli produk, mereka tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan produk tersebut.

2.2 Kekurangan dalam bisnis konvensional

1. Lingkup pemasaran terbatas, jika ingin memperluas lingkup, maka harus membuka cabang di berbagai daerah.
2. Membutuhkan modal yang cukup besar karena biasanya bisnis konvensional memerlukan tempat untuk memasarkan produknya.
3. Memerlukan banyak stok, ini juga berpengaruh terhadap modal yang dikeluarkan sehingga menjadi bertambah.
4. Apabila pembeli ingin membeli barang, maka harus pergi ke toko tempat dijualnya.

3. Masa depan bisnis offline

Walaupun faktanya bisnis online lebih menjanjikan dan pertumbuhannya semakin pesat, hal ini tidak akan mematikan sepenuhnya bisnis offline. Hal ini karena tidak semua bisnis seluruhnya bisa dilakukan secara online, misalnya bahan baku dan bahan makanan, yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis offline. Menurut Prihatmingtyas (2015) UMKM sebagai salah satu dari kegiatan ekonomi perorangan yang tetap menjadi pilihan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja, dan membentuk masyarakat yang kompeten dalam perekonomian.

Berkembangnya teknologi masyarakat memulai mencoba menggunakan media online sebagai sarana bisnis mereka, terutama

untuk promosi. Sebagian besar bisnis online memerlukan kartu kredit untuk metode pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Dan Terjemahan Departemen Agama RI. 1989. Jakarta. Indonesia.
- Bertens, K. 2013. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius .
- Fahmi, I . 2013. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniadi, Mohammad 2018 judul Implikasi teknologi informasi terhadap strategi pemasaran umkm binaan dinas koperasi dan usaha mikro di kecamatan lowokwaru kota Malang. Skripsi
- Lasri, Prihatminingtyas, 2016. Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Blimbing Berbasis Partisipatif Dalam Perlindungan Sosial. *Jurnal Care*. Vol 4 No. 3. ISSN 2089-4503
- Prihatminingtyas, B. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Usaha Kecil yang Dikelola Perempuan di Kota Malang. *Disertasi*. Universitas Merdeka. Malang
- Prihatminingtyas, B, 2015. *The business opportunity of micro industry of crispy chicken and crispy salty fish in Malang city, Indonesia. International Journal of Economics, Commerce and Management*. Vol. III, Issue 2, Feb 2015.
- Prihatminingtyas, Budi. 2016. Analysis Of The Small Business Management Food And Beverage At University Tribhuwana Tungga Dewi Malang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang*. Vol. 4 No. 2. ISSN 2089-032
- Prihatminingtyas, Budi. 2017. Small Agroindustry On Corn, Soybean and Cassava Based Products In Malang Regency. Vol 05, No.1
- Prihatminingtyas, Budi, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015 (online), http://repository.ut.ac.id/3558/1/fisip2015_27_budip.pdf, diakses 10 Desember 2017).

Sonny, Keraf. 1993. Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. Jakarta :
Pustaka Filsafat

Zhong, R. Y., Xu, X., Klotz, E., & ., Newman, S.T. 2017. Intelligent Manufacturing in the contex of industry 4.0: a review. *Engineering*, 3(5), 616-630. doi:10.1016/j.eng.2017.05.015

GLOSARIUM

Bisnis adalah kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan

Cara hidup sosial budaya adalah sikap, perbuatan, dan tujuan, serta cara pencapaiannya sudah dipolakan oleh organisasi kelompok dalam seperangkat tuntunan/pedoman tertulis

Etika Bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan

Karyawan adalah sumber daya manusia perusahaan karena telah berperan aktif bagi keberhasilan perusahaan, maka perlu mendapat pemberlakuan yang manusiawi dari perusahaan

Lingkungan sosial budaya adalah sejumlah manusia yang hidup berkelompok dan saling berinteraksi secara teratur guna memenuhi kepentingan bersama

Moral atau Moralitas adalah nilai yang dianut atau dipercaya keabsahannya di lingkungan masyarakat

Pengertian etika adalah tatakrama, sopan-santun, pedoman moral dan norma susila

Pemerintah adalah sebuah institusi yang dibentuk atas dasar konstitusi negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas

Stakeholder adalah para pihak yang berkepentingan dan terlibat langsung dalam menjalin relasi bisnis dengan perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan disekitar dimana usaha tersebut berada

INDEKS

A

ajaran Islam · 5
analisa · 106
aspek · 28, 63, 65, 71, 72, 75, 76, 84, 117

B

bisnis · ii, iv, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 59, 101, 102, 105,
106, 107, 109, 110, 111, 115, 116, 117,
119, 120, 121, 122
Bisnis · 1, 2, i, ii, iii, iv, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 28, 30, 32,
35, 36, 37, 40, 115, 117, 119, 120, 123,
124
BUMN · 14

D

domestik · 5

E

ekonomi · 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 23, 26, 32,
33, 34, 37, 42, 56, 57, 59, 61, 83, 85,
86, 87, 89, 92, 95, 98, 99, 101, 105,
106, 110, 117, 121
ekosistem · 104, 105
eksistensi · 13, 28, 31, 73
etika · ii, iii, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 15, 28, 29,
34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 75, 101, 102,
103, 106, 107, 115, 117

F

faktor eksternal · 22, 88

Faktor internal · 22
Fenomena · iii, 109

G

geografis · 46, 50, 51, 63, 93, 94

H

hak asasi manusia · 52, 53, 55, 56, 60, 81
hubungan · 2, 11, 14, 15, 16, 29, 30, 38,
39, 46, 51, 52, 64, 69, 75, 119
hukum · 2, 4, 6, 8, 23, 37, 41, 42, 43, 49,
53, 56, 58, 61, 67, 69, 75, 102

I

Ijin Usaha · 108
ilmu pengetahuan · iii, 61, 65, 68, 69, 70,
106, 113
indikator · 93, 98
informasi · 8, 16, 25, 26, 70, 71, 84, 107,
108, 112, 113, 119, 123
industri · 113
internasional · 5, 55, 68, 93
internet · 70, 111, 112, 113, 114, 119, 120

K

kaum wanita · 96, 98
keadilan · 1, 40, 56, 76, 77
kemiskinan · 51, 69, 83, 84, 85, 86, 88, 89,
92, 93, 94, 95, 96, 99
Komnas HAM · 53, 55
komunitas · 50, 51, 95, 111
konduktivitas · 14, 22
konsepsi · 63
konsumen · 8, 13, 27, 38, 40, 44, 49, 51,
54, 59, 61, 101, 108, 109, 110, 111,
114, 115, 117, 119, 120

Koperasi · 46, 51, 53, 54, 114, 129

L

Lembaga Swadaya Masyarakat · 46, 51,
53, 54, 58, 60
Lingkungan hidup · 105, 106

M

makro · 14, 26, 95, 117
Masyarakat · ii, iii, 20, 21, 52, 53, 59, 60,
85, 114
moral · ii, 1, 2, 3, 4, 10, 28, 29, 32, 33, 36,
37, 41, 42, 43, 102, 105, 106, 115, 116
muamalah · 117

N

nilai budaya · 48, 63, 64, 65, 66, 68, 69,
71, 73, 74, 75, 79
norma · 2, 3, 4, 8, 29, 36, 41, 43, 44, 79,
117

O

offline · iv, 114, 120, 121
online shop · 115, 116
otonom · 35, 36, 37

P

pajak · 19, 20
pandangan hidup · 48, 64, 73, 77, 78, 79,
80, 81, 82
pemasaran · 9, 16, 24, 28, 37, 114, 119,
121, 123
pemodal · 13, 15, 16
penduduk miskin · 87, 96
perkawinan · 46, 48, 51, 52, 63, 66
pinjaman · 5

pola pikir · 68, 71
politik · 8, 14, 23, 59, 61, 80, 83, 89, 93,
117
positif · 2, 12, 40, 59, 65, 66, 69, 70, 71,
94, 105, 112
prinsip otonomi · 35, 36
profesional · 10, 16, 29, 33, 38, 46, 47, 51,
61, 62, 103, 118

R

relasi · 13, 14, 38, 40

S

sistem · ii, 7, 8, 29, 30, 32, 33, 34, 42, 47,
48, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73,
74, 75, 79, 92, 102
solidaritas · 47, 104
sosial · ii, iii, 2, 4, 7, 13, 14, 23, 28, 29,
30, 31, 33, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 60, 61, 73, 83, 85, 86,
88, 89, 93, 95, 96, 97, 99, 101, 103,
107, 111, 114, 117, 130
sosial budaya · 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 60, 61, 73
Stakeholder · ii, 13, 15
Struktur kelompok masyarakat · 64
sumber daya alam · 89, 105, 106
sumber daya manusia · 17, 18, 25, 26, 89,
100

T

teknologi · iii, 21, 22, 23, 30, 61, 65, 68,
69, 70, 106, 109, 110, 111, 112, 113,
115, 117, 119, 123
telekomunikasi · 114, 119

W

website · 114, 115, 116

TENTANG PENULIS



Dr. Hj. Prihatminingtyas SE, M.AB dan suami bernama Drs. RY Susanto, M.AB domisili di Alamat Jln. Ikan Nus II No. 5 Malang, Jawa Timur dan juga berkarir di berbagai tempat dan pengalaman sebagai pejabat struktural 1985 - 2003 Kasubag di PPS Universitas Brawijaya, 2003 - 2008 Kabag di LPPM Universitas Brawijaya, 2008 - 2011 Kabag Perencanaan dan Sistem

Informasi Universitas Brawijaya. dan juga sebagai pejabat fungsional di kopertis, 2000 – sekarang Dosen FISIP, Fak. Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2015 - sekarang Dosen Pasca Sarjana Unitri dan Fakultas Ekonomi Unitri, 2011 - 2012 Sekretaris LPPM UNITRI, 2012 - 2015 LPPM UNITRI, Kunjungan ke LN: Singapura, Kuala Lumpur, Paris, Iong, Normandi, Strasbuck, Jerman, Swiss, Amsterdam, Brugge, Belgia, Mekah, Madinah, Dubai, Qatar, Hongkong, Shanghai, Mexiko, Baha California, Tijuana, Amerika. Bandar sri begawan, Manila, Taipe, beliau juga dikaruniani 3 orang anak Tony Budi Satriyo, SP, M.Sc, Ph.D (Dosen Fak. Pertanian UGM), Sandy Budi Wibowo, SP, M. Sc, Ph.D (dosen Fak Geografi UGM), Putri Budi Setyowati, SP, M.Sc (Dosen Fak. Pertanian Universitas Brawijaya) dan juga pengalaman penelitian (DP2M dan Kerjasama LN) 2005 Hibah SKW pedagang pasar tradisional, 2007 Hibah Pakerti UMKM di Jatim, 2009 Stranas UMKM di Jatim, 2010 -

2011 Hibah Bersaing pedagang pasar tradisional, 2011 - 2015 Penelitian dengan INRA Perancis, 2011 - 2012 Hibah Fundamental pedagang pasar tradisional, 2013 - 2015 Hibah MP3EI UMKM di Jogja, Sleman, Magelang, 2016 Hibah PUPT UMKM di Malang, 2017- 2018 Hibah penelitian Dasar Pedagang pasar tradisional di Malang, 2017 Penelitian dengan Pemda (Kehidupan sosial malam hari di kota Malang), 2019 Penelitian Dasar Ristek Dikti. Pengalaman pengabdian 2010 - sekarang Ketua KIM Lestari kota Malang, 2012 – 2017 Ketua Posdaya Unitri 2014 IBM Peluang Usaha Krispy Ayam dan Ikan Asin, 2014 IBM Pengrajin Iwak Peyek, 2015 IBM Abon Lele Probiotik Organik Di Bandung. dan juga menerima berbagai penghargaan Satyalencana Karya Satya 20 Tahun, 2006. (dari Presiden RI), Juara 2 Lomba LCCK Tingkat Bakorwil Tahun 2009 (Komimfo Jawa Timur), Satyalencana Karya Satya 30 Tahun, 2016. (dari Presiden RI).